



**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN
(LKPj) TAHUN 2019**

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Jl. Jend. Sudirman No. 47 Padang, Telp./Faks. (0751) 890720, 890721**

BAB I

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

A. Program dan Kegiatan

Pada Tahun Anggaran 2019, BPBD Provinsi Sumatera Barat memiliki total alokasi anggaran sebesar Rp.31.156.189.936,- yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.5.616.098.349,- dan Belanja Langsung sebesar Rp. 25.540.091.587,- untuk melaksanakan 10 program dan 43 kegiatan dengan rincian program dan kegiatan sebagai berikut:

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, terdiri dari 11 kegiatan yaitu:
 - 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - 3) Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Sopir Kantor;
 - 4) Penyediaan Alat Tulis Kantor;
 - 5) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - 6) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - 7) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
 - 8) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah;
 - 9) Penyediaan Jasa Informasi, Dokumentasi, dan Publikasi;
 - 10) Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur.
 - 11) Penyediaan Makanan dan Minuman;
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, terdiri dari 6 kegiatan yaitu:
 - 1) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Studio, Komunikasi, dan Informasi;
 - 2) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;
 - 3) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;
 - 4) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor;
 - 5) Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Jaringan
 - 6) Pembangunan Gedung Kantor;
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, terdiri dari 1 kegiatan yaitu:
 - 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya.
- d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, terdiri dari 1 kegiatan yaitu:
 - 1) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan.
- e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, terdiri dari 4 kegiatan yaitu:
 - 1) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
 - 2) Penatausahaan Keuangan SKPD;

- 3) Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD ;
 - 4) Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset SKPD
- f. Program Peningkatan Mitigasi Bencana, dengan 4 kegiatan yaitu :
- 1) Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Penanggulangan Bencana;
 - 2) Penyusunan Perencanaan dan Kebijakan Penanggulangan Bencana;
 - 3) Penyusunan Data dan Informasi Kebencanaan;
 - 4) Peningkatan Informasi dan Sosialisasi Kebencanaan;
- g. Program Peningkatan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana, dengan 7 Kegiatan, yaitu:
- 1) Peningkatan Peranserta Masyarakat Dalam Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana;
 - 2) Peningkatan Simulasi dan Pelatihan Kebencanaan;
 - 3) Peningkatan dan Pengembangan Pusdalops Penanggulangan Bencana;
 - 4) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kesiapsigaan Bencana;
 - 5) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengurangan Risiko Bencana;
 - 6) Peningkatan Kapasitas Relawan Penanggulangan Bencana;
 - 7) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penanggulangan Bencana Daerah;
- h. Program Pemulihan Daerah Pasca Bencana, terdiri atas 4 kegiatan yaitu:
- 1) Peningkatan Pelaksanaan Rekonstruksi Daerah Pasca Bencana;
 - 2) Peningkatan Pelaksanaan Rehabilitasi Daerah Pasca Bencana
 - 3) Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana;
 - 4) Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019;
- i. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebencanaan, terdiri atas 2 kegiatan yaitu:
- 1) Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesiapsiagaan Bencana;
 - 2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Penanganan Tanggap Darurat Bencana;
- J. Program Penanganan Tanggap Darurat Bencana, terdiri atas 2 kegiatan yaitu:
- 1) Peningkatan Penanganan Tanggap Darurat;
 - 2) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penanganan Tanggap Darurat Bencana;

B. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, alokasi anggaran sebesar Rp.1.708.863.538,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.632.660.631,- atau sebesar 95.54% dan realisasi fisik sebesar 100,00%, dengan rincian realisasi per kegiatan sebagai berikut:
- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Keluaran : Jumlah surat yang dikelola 2.200 lembar.
 - Hasil : Terlaksananya jasa surat menyurat 100%.
 - Realisasi : alokasi anggaran sebesar Rp.9.600.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.8.030.000,- atau sebesar 83.65% dan realisasi fisik sebesar 100,00%.

- 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Keluaran : Dana untuk layanan jasa komunikasi, telepon, air dan listrik yang tersedia 12 bulan.
 - Hasil : Meningkatnya jasa komunikasi, telepon, air dan listrik kantor sebesar 100%.
 - Realisasi : Alokasi anggaran sebesar Rp.230.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.191.986.866,- atau sebesar 83.47% dan realisasi fisik sebesar 100,00%.
- 3) Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Sopir Kantor
 - Keluaran: Jasa pengaman kantor (7 orang), jasa petugas kebersihan kantor (5 orang), Jasa Sopir kantor (9 orang) yang tersedia 12 bulan.
 - Hasil: Meningkatnya jasa kebersihan, pengaman, dan sopir kantor 100%
 - Realisasi: alokasi anggaran sebesar Rp.692.877.880,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.664.778.481,- atau sebesar 95.94% dan realisasi fisik sebesar 100,00%.
- 4) Penyediaan Alat Tulis Kantor
 - Keluaran: Alat Tulis Kantor sesuai kebutuhan yang tersedia 12 bulan.
 - Hasil: Tersedianya alat tulis kantor 100%.
 - Realisasi: alokasi anggaran sebesar Rp.55.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.54.971.250,- atau sebesar 99,95% dan realisasi fisik sebesar 100,00%.
- 5) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Keluaran: Barang cetakan dan penggandaan yang tersedia 1 tahun.
 - Hasil: Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 100%.
 - Realisasi: alokasi anggaran sebesar Rp.51.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.50.956.700,- atau sebesar 99.92% dan realisasi fisik sebesar 100,00%.
- 6) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Keluaran: Jumlah komponen instalasi/penerangan kantor yang tersedia secara optimal 1 Tahun.
 - Hasil: Tersedianya komponen instalasi/ penerangan bangunan kantor 100%.
 - Realisasi: alokasi anggaran sebesar Rp.18.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.17.925.000,- atau sebesar 99.58% dan realisasi fisik sebesar 100,00%.
- 7) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan;
 - Keluaran: Jumlah bahan bacaan kantor yang tersedia 6 jenis.
 - Hasil: Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan 100%

- Realisasi: alokasi anggaran sebesar Rp.39.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.38.100.000,- atau sebesar 97.69% dan realisasi fisik sebesar 100,00%.

8) Rapat – rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah

- Keluaran: Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah yang terlaksana 1 tahun.
- Hasil: Tersedianya Rapat – rapat koordinasi ke Dalam dan Luar Daerah 100%.
- Realisasi: alokasi anggaran sebesar Rp.434.385.658,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.429.860.334,- atau sebesar 98.96% dan realisasi fisik sebesar 100,00%.

9) Penyediaan Jasa Informasi, Dokumentasi dan Publikasi

- Keluaran: Jasa Informasi/Publikasi yang tersedia 1 tahun.
- Hasil: Tersedianya Jasa Informasi, Dokumentasi dan Publikasi 100%
- Realisasi: alokasi anggaran sebesar Rp.136.400.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.135.080.000,- atau sebesar 99.58% dan realisasi fisik sebesar 100,00%.

10) Penyediaan Jasa Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur

- Keluaran: Terlaksananya Wirid dan Senam Bagi Aparatur 1 tahun
- Hasil: meningkatnya pembinaan mental dan fisik aparatur 100%.
- Realisasi: alokasi anggaran sebesar Rp.600.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.600.000,- atau sebesar 100,00% dan realisasi fisik sebesar 100,00%.

11) Penyediaan Makanan dan Minuman

- Keluaran: Makanan dan Minuman rapat – rapat yang tersedia 1 tahun.
- Hasil: Tersedianya Makanan dan Minuman 100%.
- Realisasi: alokasi anggaran sebesar Rp.42.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.21.848.800,- atau sebesar 56.02% dan realisasi fisik sebesar 100,00%

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur alokasi anggaran sebesar Rp.1.237.928.610,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.199.810.283,- atau sebesar 96.92% dan realisasi fisik sebesar 100,00%, terdiri dari 6 kegiatan dengan rincian realisasi per kegiatan sebagai berikut:

1) Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Studio, Alat Komunikasi dan Informasi

- Keluaran : Jumlah alat studio, komunikasi dan Informasi yang terpelihara 6 unit
- Hasil : Terlaksananya Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi dan Informasi 100%

- Realisasi : Alokasi anggaran sebesar Rp. 10.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 10.000.000,- atau sebesar 100% dan realisasi fisik sebesar 100%
- 2) Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor
- Keluaran : Jumlah Gedung Kantor yang terpelihara 1 unit
 - Hasil : terlaksananya pemeliharaan gedung kantor 100%
 - Realisasi : Alokasi anggaran sebesar Rp. 185.450.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 178.758.223,- atau sebesar 96.39% dan realisasi Fisik sebesar 100 %
- 3) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;
- Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang terpelihara 9 unit kendaraan roda dua 1 kali dan 7 unit kendaraan roda empat 2 kali
 - Hasil : Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional 100%
 - Realisasi : Alokasi anggaran sebesar Rp. 336.303.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 320.509.450,- atau sebesar 95.30% dan realisasi fisik sebesar 100%
- 4) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
- Keluaran : Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara berupa laptop,AC,Genset,Mesin Hitung, Penghancur Kertas, Komputer PC,Printer, PC Editing,Mesin Tik, Penampung air, dan Pompa air sebanyak 124 unit dan Perpeliharanya Sofa dan Kursi Tamu sebanyak 4 set dan 10 unit.
 - Hasil : Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor dan Pemeliharaan Komputer 100%
 - Realisasi : Alokasi anggaran sebesar Rp. 107.600.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 101.359.000,- atau sebesar 94.20% dan realisasi fisik sebesar 100%
- 5) Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi dan Jaringan;
- Keluaran : Pemeliharaan Instalasi Listrik, telpon dan Air yang terlaksana 1 tahun
 - Hasil : Terlaksananya pemeliharaan instalasi jaringan 100%
 - Realisasi : Alokasi anggaran sebesar Rp. 56.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 46.608.000,- atau sebesar 83.23% dan realisasi fisik sebesar 100%
- 6) Pembangunan Gedung kantor;
- Keluaran : Tersedianya Gedung kantor 1 unit
 - Hasil : Tersedianya Gedung kantor 100%

- Realisasi : Alokasi anggaran sebesar Rp. 542.575.610,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 542.575.610,- atau sebesar 100% dan realisasi fisik sebesar 100%

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, terdiri dari 1 kegiatan yaitu:

1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya.

- Keluaran : Pakaian dinas dan kelengkapannya yang tersedia 55 (stel)
- Hasil : Meningkatnya disiplin berpakaian aparatur 100%
- Realisasi : Alokasi Anggaran sebesar Rp. 41.250.000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 41.250.000,- atau sebesar Rp. 100,00% dan realisasi fisik sebesar 100,00%

d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, terdiri dari 1 kegiatan yaitu:

1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan.

- Keluaran : Jumlah Aparatur yang bertambah pengetahuannya tentang peraturan perundang-undangan 1 tahun
- Hasil : Meningkatnya wawasan dan pengetahuan teknis aparatur 100%
- Realisasi : Alokasi Anggaran sebesar Rp. 52.140.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 44.673.993,- atau sebesar Rp. 85.68% dan realisasi fisik sebesar 100%

e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, alokasi anggaran sebesar Rp.440.268.600,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.435.979.500,- atau sebesar 99.93% dan realisasi fisik sebesar 100,00% dengan 4 kegiatan yaitu terdiri dari 4 kegiatan yaitu:

1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;

- Keluaran: Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, Laporan akhir tahun SKPD (Laporan Keuangan, Laporan Tahunan SKPD, LPPD,LKPj,LAKIP) yang tersusun 5 laporan 12 bulan.
- Hasil: Meningkatnya Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan tertib administrasi keuangan 100%
- Realisasi: Alokasi Anggaran sebesar Rp. 105.975.900,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 105.403.000,- atau sebesar Rp. 99,46% dan realisasi fisik sebesar 100%

2. Penatausahaan Keuangan SKPD;
 - Keluaran : Honorarium Pengelola Keuangan, Honorarium Pengelola SIPKD,dll yang tersedia 12 bulan
 - Hasil : Terlaksananya Penatausahaan Keuangan SKPD 100%
 - Realisasi : Alokasi Anggaran sebesar Rp. 225.018.100,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 222.566.500,- atau sebesar Rp. 98.91% dan realisasi fisik sebesar 100%

3. Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD
 - Keluaran : Perencanaan dan Penganggaran SKPD (Pra RKA, RKA, DPA, DPPA, ekspose Kepala Badan yang terlaksana 1 tahun
 - Hasil: Terlaksananya penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD 100%
 - Realisasi : Alokasi Anggaran sebesar Rp. 12.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 11.438.300,- atau sebesar Rp. 95.32% dan realisas fisik sebesar 100%

4. Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset SKPD
 - Keluaran : Honorarium Pengurus dan Penyimpanan Barang yang tersedia 12 bulan
 - Hasil : Terlaksananya Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Asset SKPD 100%
 - Realisasi : Alokasi anggaran sebesar Rp. 97.274.600,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 96.571.700,- atau sebesar Rp. 99.28% dan realisasi fisik sebesar 100%

- f. Program Peningkatan Mitigasi Bencana, alokasi anggaran sebesar Rp.3.195.190.194,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.3.111.061.476,- atau sebesar 97.37% dan realisasi fisik sebesar 100,00% dengan 4 kegiatan yaitu :
 1. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Penanggulangan Bencana;
 - Keluaran : Terlaksananya koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program Penanggulangan Bencana Provinsi dan Kabupaten/Kota 1 provinsi dan 19 kab/kota 2 kali.
 - Hasil : Sinergisnya program penanggulangan bencana antara Kabupaten/Kota dan Provinsi 100%.
 - Realisasi : Alokasi Anggaran sebesar Rp. 348.725.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 328.728.793,- atau sebesar Rp. 94.27% dan realisasi fisik sebesar 100%

2. Penyusunan Perencanaan dan Kebijakan Penanggulangan Bencana
 - Keluaran: Terlaksananya Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Provinsi Sumatera Barat, 1 Kegiatan
 - Hasil: tersedianya enyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Provinsi Sumatera Barat 1 dokumen.
 - Realisasi: alokasi anggaran sebesar Rp.251.295.194,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.246.400.141,- atau sebesar 98.05% dan realisasi fisik sebesar 100,00%.
3. Penyusunan Data dan Informasi Kebencanaan;
 - Keluaran: Terlaksananya pelatihan teknis petugas data dan informasi kebencanaan 58 org/ 3 hari, terlaksananya penyusunan data dan informasi kebencanaan 1 tahun.
 - Hasil: Tersedianya data dan informasi kebencanaan kabupaten/kota se sumatera barat dan tersusunnya data dan informasi kebencanaan Provinsi sumatera barat 100%
 - Realisasi: alokasi anggaran sebesar Rp.200.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.194.704.783,- atau sebesar 98.05% dan realisasi fisik sebesar 100,00%.
4. Peningkatan Informasi dan Sosialisasi Kebencanaan
 - Keluaran: Terlaksananya pencetakan publikasi media kebencanaan brosur/leaflet, buku sosialisasi kebencanaan, poster dan kalender 4500 lembar/buah, 100 eksemplar, Terlaksananya sosialisasi kebencanaan kepada aparatur kab/kota 100 org/ 1 kali, dan Terlaksananya pelatihan teknis sekolah madrasah aman bencana kepada guru dan siswa tingkat SLTA di sumatera barat 500 org/5 angkatan.
 - Hasil: Terdesiminasinya informasi kebencanaan kepada aparatur penanggulangan dan tersedianya tenaga teknis program sekolah madrasah aman bencana kepada guru tingkat SLTA di sumatera barat 100%.
 - Realisasi: alokasi anggaran sebesar Rp.2.395.170.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.2.341.227.759,- atau sebesar 97.75% dan realisasi fisik sebesar 100,00%.

g. Program Peningkatan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana, alokasi anggaran sebesar Rp.9.200.956.867,- dengan realisasi keuangan Rp.8.715.565.546,- atau sebesar 94.72% dan realisasi fisik sebesar 100,00% dengan 7 Kegiatan, yaitu:

1. Peningkatan Peranserta Masyarakat Dalam Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana

- Keluaran: terlaksananya pembentukan nagari tangguh bencana tahun 2019 sebanyak 2 nagari/ 2 kabupaten/kota , terlaksananya pembinaan nagari tangguh bencana tahun 2 nagari/1 kabupaten/kota serta terlaksananya sosialisasi destana 3 kali
 - Hasil: Meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana 100%.
 - Realisasi: Alokasi anggaran sebesar Rp. 500.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 467.033.539,- atau sebesar 93.41% dan realisasi fisik sebesar 100,00%.
2. Peningkatan Simulasi dan Pelatihan Kebencanaan
- Keluaran: Terlaksananya simulasi/pelatihan penanggulangan 200 org/ 1kali, terlaksananya pelatihan informasi dan comunication rescue (core) 85 org/ 1kali, dan terlaksananya apel siaga dan parade 165 org/ 1 kali
 - Hasil: Meningkatnya keterampilan aparaturnya dan masyarakat dalam penanggulangan bencana 100%.
 - Realisasi: alokasi anggaran sebesar Rp.1.325.877.300,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.1.291.743.869,- atau sebesar 97.43% dan realisasi fisik sebesar 100,00%.
3. Peningkatan dan Pengembangan Pusdalops Penanggulangan Bencana
- Keluaran: Terfasilitasinya Honorarium dan Operasional petugas pusdalops PB yang tersedia 56 org/12 bulan dan Terlaksananya pertemuan antar lembaga 4 kali
 - Hasil: berfungsinya Pusdalops PB Prov.Sumbar secara maksimal 100%.
 - Realisasi: alokasi anggaran sebesar Rp.1.195.900.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.1.104.638.650,- atau sebesar 92.37% dan realisasi fisik sebesar 100,00%.
4. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kesiapsiagaan Bencana
- Keluaran: Terlaksananya pembinaan TRC kab/kota 1 provinsi dan 19, Terlaksananya pelatihan teknis TRC Penanggulangan Bencana 200 org/ 2 kali, dan Terlaksananya Pelatihan teknis petugas posko incident command system (ICS) 100 org/kali
 - Hasil: meningkatnya kesiapsiagaan aparaturnya dalam menghadapi bencana 100%.

- Realisasi: Alokasi anggaran sebesar Rp.1.150.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.1.064.533.618,- atau sebesar 92.57% dan realisasi fisik sebesar 100,00%.
5. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengurangan Risiko Bencana
- Keluaran: Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan PRB 1 Provinsi dan 16 Kab. Kota, Terlaksananya Jambore PRB tingkat Provinsi dan Kab/kota 285 org/ 1 kali, Terlaksananya Rakor PRB Tingkat Provinsi dan Kab/Kota 60 org/1 kali, Terkirimnya Aparatur untuk mengikuti bulan PRB Nasional 4 org/ 1 kali, dan Terkirimnya Tim Pameran Bulan PRB Nasional 8 org/ 1 kali
 - Hasil: Meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana 100%.
 - Realisasi: alokasi anggaran sebesar Rp.890.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.826.965.240,- atau sebesar 92.92% dan realisasi fisik sebesar 100,00%.
6. Peningkatan Kapasitas Relawan Penanggulangan Bencana
- Keluaran: Terlaksananya pembinaan KSB Kabupaten/kota 1 provinsi dan 5 kab/kota, Terlaksananya pelatihan relawan kebencanaan kab/kota terpilih 285 org/1 kali dan 160 org/3 kali, terlaksananya sosialisasi 45 org/1 kali, dan Terlaksananya peringatan 10 tahun gempa sumbar 1 kali.
 - Hasil: Meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana 100%.
 - Realisasi: alokasi anggaran sebesar Rp.4.089.179.567,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.3.912.373.830,- atau sebesar 95.68% dan realisasi fisik sebesar 100,00%.
7. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penanggulangan Bencana Daerah
- Keluaran: Terlaksananya rapat kerja antar kelembagaan penanggulangan bencana di Sumatera Barat, Terlaksananya penyelenggaraan hari kesiapsiagaan 1 kali.
 - Hasil: meningkatnya kesiapsiagaan aparatur dalam menghadapi bencana 100%.
 - Realisasi: alokasi anggaran Rp.50.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.48.276.800,- atau sebesar 96.55% dan realisasi fisik sebesar 100,00%.

h. Program Pemulihan Daerah Pasca Bencana, alokasi anggaran sebesar Rp.4.210.750.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.3.742.167.937,- atau sebesar 98.20% dan realisasi fisik sebesar 100,00% terdiri atas 5 kegiatan yaitu:

1. Peningkatan Pelaksanaan Rekonstruksi Daerah Pasca Bencana

- Keluaran: Terlaksananya Survey, verifikasi, monitoring dan evaluasi kegiatan rekonstruksi pasca bencana 1 tahun
- Hasil: Sinergisnya Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi daerah pasca bencana 100%
- Realisasi: alokasi anggaran sebesar Rp.170.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.162.828.332,- atau sebesar 98.20% dan realisasi fisik sebesar 100,00%.

2. Peningkatan Pelaksanaan Rehabilitasi Daerah Pasca Bencana

- Keluaran: Terlaksananya Survey, verifikasi, monitoring dan evaluasi kegiatan rehabilitasi pasca bencana 1 tahun
- Hasil: terkendalinya pelaksanaan rehabilitasi daerah pasca bencana 100%.
- Realisasi: alokasi anggaran sebesar Rp.140.750.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.138.246.104,- atau sebesar 98.22% dan realisasi fisik sebesar 100,00%.

3. Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana

- Keluaran: Terlaksananya pertemuan teknis dan Koordinasi JITU PASNA 200 org/2 kali, Terkirimnya aparatur unyuk mengikuti bulan PRB Nasional bidang RR 3 org /1 kali, Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Koordinasi JITU PASNA 360 org/4 kali, Terlaksananya rapat koordinasi JITU PASNA 225 org/3 kali, dan terlaksananya sosialisasi JITU PASNA 125 org/1 kali.
- Hasil: meningkatnya penyelenggaraan JITU PASNA di daerah Pasca Bencana.
- Realisasi: Alokasi anggaran sebesar Rp.3.500.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.3.441.093.501,- atau sebesar 98.32% dan realisasi fisik sebesar 100,00%.

4. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019;

- Keluaran: Terlaksananya monev dan verifikasi usulan rehabilitasi, rapat evaluasi dan terfasilirasinya usulan dan pelaksanaan rehabilitasi daerah pasca bencana 19 kab/kota, 1 provinsi dan 1 laporan
- Hasil: terkendalinya pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi daerah pasca bencana 100%

- Realisasi: alokasi anggaran sebesar Rp. 400.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 0,00,- atau sebesar 0% dan realisasi fisik 0%
- i. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebencanaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.993.691.178,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 4.674.255.133,- atau sebesar 93,60% dan realisasi Fisik Sebesar 100% terdiri atas 2 kegiatan yaitu:
- 1) Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesiapsiagaan Bencana;
 - Keluaran: Terlaksananya monitoring sarana dan prasarana kesiapsiagaan 1 tahun, terlaksananya pengadaan drone 1 unit, penerima radio peringatan tsunami 32 unit, alat-alat studio kesiapsiagaan 1 paket, EWS 21 paket, Perlengkapan penyelamatan air 2 paket dan Sosialisasi peningkatan sarana dan prasarana kebencanaan 80 org/1 kali
 - Hasil : Meningkatnya dan Berfungsinya sarana dan prasarana kesiapsiagaan bencana secara optimal 100%
 - Realisasi: Alokasi anggaran sebesar Rp. 3.403.622.400,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 3.127.928.973,- atau sebesar 91.90% dan ralisasi fisik sebesar 100%
 - 2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Penanganan Tanggap Darurat Bencana;
 - Keluaran : Tersedianya sarana dan prasarana tanggap darurat bencana dan peralatan kebencanaan 1 tahun.
 - Hasil : Berfungsinya pengurusan gudang logistik, peningkatan peralatan dan meningkatnya kemampuan SDM penanganan darurat bencana 100%
 - Realisasi : alokasi anggaran sebesar Rp. 1.590.068.778,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.546.326.160,- atau sebesar Rp. 97.25% dan realisasi Fisik sebesar 100%
- j. Program Penanganan Tanggap Darurat Bencana dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 459.052.600,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 458.333.904,- atau sebesar 99.84% dan realisasi fisik sebesar 100% ,terdiri atas 2 kegiatan yaitu:
- 1) Peningkatan Penanganan Tanggap Darurat;
 - Keluaran: Terkoordinasinya pelaksanaan penanganan tanggap darurat secara terpadu dan terkoordinir 19 kab/kota
 - Hasil : berfungsinya dan meningkatnya kemampuan penanganan tanggap darurat 100 %
 - Realisasi: alokasi anggaran sebesar Rp. 259.052.600- dengan realisasi sebesar Rp.258.424.454,- atau sebesar 99.76% dan realisasi fisik 100%

- 2) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penanganan Tanggap Darurat Bencana
 - Keluaran : Termonitornya dan terevaluasinya pelaksanaan penanganan tanggap darurat bencana provinsi dan kab/kota
 - Hasil : berfungsinya dan meningkatnya kemampuan evakuasi korban bencana 100%
 - Realisasi : alokasi anggaran sebesar Rp. 200.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 199.909.450,- atau sebesar 99.95% dan realisasi fisik 100%

C. Outcome

Outcome Pelaksanaan Program/Kegiatan Tahun 2019 sebagai berikut:

1. Meningkatnya kesiapan masyarakat menghadapi bencana dengan meningkatkan kualitas perencanaan dan kebijakan penanggulangan bencana, meningkatkan keakuratan data dan penyebarluasan informasi kebencanaan, meningkatkan kesepakatan dengan lembaga/instansi terkait, meningkatkan kapasitas aparatur penanggulangan bencana, meningkatkan kapasitas relawan penanggulangan bencana, meningkatkan peranserta masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana dan meningkatkan operasional Pusdalops PB.
2. Meningkatnya peralatan dan sistem peringatan dini bencana dengan meningkatkan jumlah *early warning system* dan meningkatkan jumlah dan pemeliharaan peralatan lapangan dan logistik kebencanaan *stock opname*
3. Meningkatnya penanganan tanggap darurat bencana dengan meningkatkan koordinasi, monitoring dan evaluasi penanganan siaga darurat dan penanganan tanggap darurat di wilayah bencana.
4. Meningkatnya pemulihan wilayah/daerah pasca bencana dengan meningkatkan koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur, ekonomi, sosial, budaya, dan psikologi di daerah pasca bencana.

D. Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

- 1) Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Penanggulangan Bencana

- Masih kurangnya komitmen pemerintah daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam hal perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program penanggulangan bencana yang berdampak dan dirasakan langsung oleh masyarakat.

- Penghimpunan data kebencanaan dari Kabupaten/Kota sering tidak tepat waktu dan tidak lengkap. Hal tersebut dapat mempengaruhi keakuratan dan penyebaran data kebencanaan yang berfungsi sebagai salah satu acuan dalam pengambilan kebijakan penanggulangan bencana baik itu di tingkat Provinsi maupun di tingkat Kabupaten/Kota.
- 2) Penyusunan Perencanaan dan Kebijakan Penanggulangan Bencana
- Luasnya cakupan wilayah kerja dalam rangka pengumpulan data-data yang diperlukan dalam penyusunan Dokumen Rencana Aksi PRB untuk periode 2021 - 2025. sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama dalam penyelesaiannya.
- 3) Penyusunan Data dan Informasi Kebencanaan
- Belum semua Kabupaten/Kota yang memahami pentingnya data dan informasi kebencanaan ini untuk pemetaan dalam penanggulangan bencana yang berikutnya yang disebabkan masih ada petugas pengelola DIBI di Kabupaten/Kota yang sering bergantian sehingga kedinamisan data belum dapat diperoleh.
- 4) Peningkatan Informasi dan Sosialisasi Kebencanaan
- Peserta yang hadir pada kegiatan Informasi dan Sosialisasi Daerah Rawan Bencana belum sesuai dengan yang diharapkan, karena peserta yang dikirim dari daerah tidak sesuai dengan tugas dari Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.
 - Terbatasnya anggaran sehingga waktu pelaksanaan terpaksa disingkat dan pemaparan materi harus dipadatkan jadinya didapatkan hasil yang kurang maksimal.
 - Keterbatasan SDM yang menguasai konsep dan teknis pelaksanaan kegiatan, dan SDM dalam design grafis sehingga memperlambat proses pembuatan leaflet, poster dan kalender yang menarik.
- 5) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengurangan Risiko Bencana
- Masih kurangnya komitmen pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota dalam memfasilitasi pembentukan dan pembinaan kelompok siaga bencana (KSB) di daerah masing - masing.
 - Masih kurangnya dukungan kebijakan dan penganggaran dalam meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana.
 - Terbatasnya sumber daya manusia (SDM) dalam mengelola / melaksanakan kegiatan.

Keterbatasan SDM yang menguasai konsep dan teknis pelaksanaan kegiatan, dan SDM dalam design grafis sehingga memperlambat proses pembuatan leaflet, poster dan kalender yang menarik

6) Peningkatan Simulasi dan Pelatihan Kebencanaan

- Proses keseluruhan kegiatan pelatihan/simulasi tidak mempunyai perencanaan teknis operasi secara detil.
- Kurangnya pengetahuan petugas dalam penanggulangan bencana baik kabupaten/kota, OPD, Instansi serta lembaga terkait kebencanaan.
- Keterbatasan peralatan kebencanaan yang dimiliki oleh daerah dan provinsi.

7) Pengembangan dan Peningkatan Pusdalops Penanganan Bencana

- Terlambatnya informasi kejadian bencana yang dilaporkan oleh BPBD Kabupaten/Kota ke Pusdalops Penanggulangan Bencana.
- Masih belum tertibnya administrasi dan pelaporan kejadian bencana yang disampaikan oleh Kabupaten/Kota setiap bulannya.
- Pemeliharaan Sarana dan Prasarana yang ada di Pusdalops PB masih belum bisa dilakukan secara maksimal.
- Belum seluruh Kabupaten/Kota yang sudah membentuk Pusdalops PB sehingga menyulitkan dalam pelaksanaan pendataan.

9) Peningkatan Pelaksanaan Rekonstruksi Daerah Pasca Bencana

- Masih rendahnya tingkat kehadiran peserta pada rapat koordinasi sehingga berdampak pada kurangnya informasi dan pemahaman tentang kebencanaan khususnya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.
- Banyaknya proposal kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dari Kabupaten/Kota yang dikembalikan karena persyaratan yang tidak lengkap. Hali ini disebabkan minimnya SDM yang dapat menyusun proposal karena sering terjadi mutasi di Lingkungan Kabupten/Kota.
- Terbatasnya waktu pelaksanaan kegiatan, sehingga kegiatan kunjungannya hanya dilakukan pada lokasi prioritas

8) Peningkatan Pelaksanaan Rehabilitasi Daerah Pasca Bencana

- Belum memadainya dana APBD yang disediakan kabupaten/kota untuk pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di masing – masing daerah, sehingga pelaksanaan kegiatan belum maksimal dan membutuhkan dukungan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.
- Sebagian besar pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi didaerah langsung dilaksanakan oleh SKPD teknis terkait tanpa melibatkan BPBD Kabupaten/Kota.

- Belum memadainya sumber daya manusia aparatur penyelenggara rehabilitasi dan rekonstruksi dalam menghitung kerusakan dan kerugian (DaLA) Kabupaten/Kota.
 - Kewenangan terhadap Aset yang rusak selalu menjadi factor penghambat kabupaten/kota dalam mengusulkan bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi.
 - Masih kurangnya komitmen beberapa kabupaten/kota dalam menyelesaikan kewajiban menyerahkan laporan akhir terhadap bantuan periode sebelumnya dari BNPB, sehingga berdampak kepada hambatan/penundaan pemberian bantuan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang diusulkan.
- 9) Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana
- Tidak tersedianya waktu pembelajaran untuk praktek lapangan mengingat padatnya materi yang diberikan kepada peserta.
 - kurang luasnya ruangan yang tersedia pada saat melakukan praktek/simulasi, sehingga tidak semua peserta dapat melakukan praktek langsung.
 - Terbatasnya sumber daya manusia yang tersedia untuk mengelola/melaksanakan kegiatan.
- 10) Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesiapsiagaan Bencana
- Waktu pelaksanaan yang terlalu singkat sehingga proses pengadaan sangat ketat dan membutuhkan waktu dan tenaga yang sangat prima untuk menyelesaikan tugas tersebut.
 - Lokasi Pemasangan terutama pemasangan Early Warning System (EWS) tsunami di beberapa kabupaten dan perubahan tempat dan proses izin pemasangan yang membutuhkan waktu lama.
- 11) Peningkatan Sarana dan Prasarana Penanganan Tanggap Darurat
- Masih terbatasnya peralatan kebencanaan yang dimiliki.
 - belum terpeliharanya peralatan yang ada sepenuhnya dikarenakan alokasi anggaran yang terbatas.
- 12) Peningkatan Penanganan Tanggap Darurat
- Masih kurangnya koordinasi di lapangan antara BPBD Kabupaten/Kota, OPD, Instansi serta lembaga terkait kebencanaan pada saat terjadinya bencana.
 - Terbatasnya sumber daya manusia yang tersedia untuk mengelola/melaksanakan kegiatan.
 - Belum terbentuknya Tim Reaksi Cepat (TRC) tingkat Provinsi sesuai Peraturan dan pada masing - masing Kabupaten/Kota serta pelaporan ke BPBD Provinsi Sumatera Barat terkendala oleh komunikasi pada saat bencana.
 - Keterbatasan peralatan kebencanaan yang dimiliki oleh daerah dan provinsi

- Tidak tersedianya alokasi anggaran berupa operasional saat penanganan darurat bencana.

13) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penanganan Tanggap Darurat

- Minimnya sumber daya terampil dan mengerti administrasi untuk terwujudnya tertib administrasi untuk darurat bencana serta untuk mengelola kegiatan.
- Masih kurangnya Koordinasi di lapangan antara BPBD Kabupaten/Kota dalam pelaporan dan pelaksanaan penggunaan dana yang telah dialokasikan baik oleh pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat.

b. Solusi

1) Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Penanggulangan Bencana

- Perlu ditingkatkan komitmen BPBD Provinsi dan Kabupaten/Kota terkait perencanaan dan pelaksanaan program penanggulangan bencana, serta ketersediaan data kebencanaan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai tupoksi dan kewenangan dinas/instansi dan daerah masing-masing

2) Penyusunan Perencanaan dan Kebijakan Penanggulangan Bencana

- Memaksimalkan potensi yang ada dalam pengumpulan data-data yang diperlukan dalam penyusunan Rencana Aksi PRB.

3) Penyusunan Data dan Informasi Kebencanaan

- Untuk kedepannya pengelola data DIBI di masing- masing Kabupaten/Kota untuk dapat ditunjuk satu orang petugas yang memenuhi kriteria sebagai pengelola data dan minimal 5 tahun baru dimutasikan.
- Meningkatkan kapasitas SDM sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi pengolahan data kebencanaan.

4) Peningkatan Informasi dan Sosialisasi Kebencanaan

- Keterbatasan dalam pembuatan design leaflet, poster dan baliho dapat diatasi dengan cara mengadakan perlombaan design grafis kebencanaan kepada masyarakat.
- Pelaksanaan kegiatan sosialisasi kebencanaan aparatur diharapkan dapat dilaksanakan di triwulan I dan II agar dapat diikuti dengan maksimal oleh para peserta.
- Kegiatan Sekolah/Madrasah Aman Bencana sebaiknya yang dibina adalah fasilitator dari sekolah - sekolah untuk mamfasilitasi terbentuknya Sekolah/Madrasah Aman Bencana yang sekarang disebut Satuan Pendidikan Aman Bencana.

- Diperlukan Kerjasama Multipihak dengan melibatkan instansi terkait kebencanaan sehingga informasi yang disampaikan lebih luas dan lebih menyeluruh.
- 5) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengurangan Risiko Bencana.
- Perlu Ditingkatkan Komitmen pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota terkait dukungan kebijakan dan penganggaran dalam meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana.
 - Perlu dilakukan koordinasi dan sinkronisasi penganggaran terkait belanja perhalan dinas luar daerah yang tidak terealisasi sehingga dapat dilakukan perubahan dalam APBD-P
- 6) Peningkatan Simulasi dan Pelatihan Kebencanaan
- Perlunya ditingkatkan komitmen antara BPBD provinsi dengan BPBD Kabupaten/Kota
 - Perlunya pelatihan lanjutan bagi aparatur baik tingkat provinsi maupun kabupaten kota agar disaat terjadi bencana mereka siap turun ke lapangan.
- 7) Pengembangan dan Peningkatan Pusdalops Penanganan Bencana
- Akan menjalankan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pusdalops PB Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan ketentuan yang ada.
 - Diperlukan pembinaan tertib administrasi dan pelaporan kejadian bencana yang disampaikan oleh kabupaten/kota setiap bulannya.
 - Diperlukannya perbaikan segera dan perawatan peralatan - peralatan yang ada pada Pusdalops PB Provinsi Sumatera Barat.
 - Perlu melakukan pembinaan dan pembelajaran bersama ke Kabupaten/Kota untuk memperkuat keahlian dan pengetahuan personil Pusdalops PB yang diharapkan hasilnya juga menjadi stimulan untuk menunjukkan pentingnya pembentukan Pusalops di Kabupaten/kota yang belum memiliki Pusalops PB dengan memperlihatkan fungsi - fungsi Pusdalops melalui kegiatan pembelajaran bersama.
- 7) Peningkatan Pelaksanaan Rehabilitasi Daerah Pasca Bencana
- Melakukan koordinasi langsung ke SKPD teknis dan BPBD kabupaten/Kota terkait informasi dan kebijakan pusat dalam pelaksanaan rekonstruksi pasca bencana dan memberikan arahan dan masukan terkait usulan, pengelolaan dana kegiatan rekonstruksi pasca bencana
 - Melakukan verifikasi terhadap usulan dari kabupaten/kota sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan oleh BNPB sebelum rekomendasi Gubernur dikeluarkan.
 - Pelaksanaan kegiatan berikutnya akan dilaksanakan sesuai jadwal.

- 8) Peningkatan Pelaksanaan Rehabilitasi Daerah Pasca Bencana
- Memfasilitasi Kabupaten/Kota dan memberikan dukungan usulan bantuan pendanaan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi daerah pasca bencana
 - Melakukan pertemuan rutin, berkala dan khusus yang melibatkan seluruh BPBD Dan SKPD teknis kab/kota dalam rangka menghindari pendanaan dan usulan rehabilitasi ganda.
 - Meningkatkan anggaran dan kegiatan pendukung sumber daya manusia aparatur pelaksana rehabilitasi daerah pasca bencana terkait penghitungan kerugian dan kerusakan (DaLA) kabupaten/kota melalui pelaksanaan kegiatan pelatihan hitung cepat /JITU PASNA, sosialisasi, serta konsultasi rutin dan berkala ke BNPB.
 - Melakukan Koordinasi dan pertemuan khusus dengan BPBD dan SKPD teknis terkait dalam menetapkan usulan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi guna menghindari tumpang tindih usulan dan pendanaan serta guna ditetapkannya kewenangan pelaksana infrastruktur dan sarana prasarana umum serta social oleh pemerintah daerah.
 - BPBD Kabupaten/Kota yang masih mempunyai kewajiban terkait laporan akhir kegiatan rehabilitasi daerah pasca bencana yang sumber dananya berasal dari BPPB, Agar segera melakukan pendekatan dan penjelasan kepada Kepala Daerah masing - masing serta berkonsultasi dengan BNPB;
- 9) Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana
- Menambah jam pelajarn sesuai kebutuhan dan kesepakatan dengan peserta
 - Praktek/simulasi dilakukan hanya per kelompok dengan materi/objek yang berbeda-beda untuk masing – masing kelompok
 - Perlu adanya kebijakan pimpinan terkait pemerataan sumber daya manusia aparatur untuk mengelola/melaksanakan kegiatan.
- 10) Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesiapsiagaan Bencana
- Untuk kegiatan pengadaan berikutnya untuk dilaksanakan pada awal waktu, sehingga memudahkan dalam proses pengadaannya.
- 11) Peningkatan Sarana dan Prasarana Penanganan Tanggap Darurat
- Mengupayakan untuk koordinasi dengan BNPB terkait hibah peralatan kebencanaan serta mengusulkan untuk penambahan anggaran pada pemerintah daerah.
- 12) Peningkatan Penanganan Tanggap Darurat
- Perlunya komitmen pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota terkait dukungan kebijakan dan penganggaran dalam peningkatan penanganan tanggap darurat bencana dalam menghadapi bencana sesuai kewenangan daerah masing - masing.

13) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penanganan Tanggap Darurat

- Perlunya komitmen pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota terkait dukungan kebijakan dan penganggaran dalam peningkatan penanganan tanggap darurat bencana dalam menghadapi bencana sesuai kewenangan daerah masing - masing.
- Perlunya pembahasan dalam penetapan keputusan Gubernur, Bupati dan Walikota tentang pembentukan Tim Reaksi Cepat (TRC)
- Perlunya peningkatan kemampuan sumber daya yang tersedia di seluruh daerah rawan bencana.

BAB II PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBATUAN DAN DEKONSENTRASI

- A. Pada Tahun Anggaran 2019, BPBD Provinsi Sumatera Barat tidak menerima Dana Tugas Pembantuan dari Pemerintah Pusat.
- B. Pada Tahun Anggaran 2019, BPBD Provinsi Sumatera Barat tidak memberikan Dana Tugas Pembantuan.

BAB III PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

A. Kerjasama Antar Daerah

Kerjasama antar daerah bukan merupakan Tugas Pokok dan Fungsi BPBD Provinsi Sumatera Barat.

B. Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga

Kerjasama daerah dengan pihak ketiga bukan merupakan Tugas Pokok dan Fungsi BPBD Provinsi Sumatera Barat.

C. Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah

Koordinasi dengan Instansi Vertikal di daerah bukan merupakan Tugas Pokok dan Fungsi BPBD Provinsi Sumatera Barat.

D. Pembinaan Batas Wilayah

Pembinaan batas wilayah bukan merupakan Tugas Pokok dan Fungsi BPBD Provinsi Sumatera Barat.

E. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana

1. Bencana yang terjadi dan Penanggulangannya

Sumatera Barat adalah wilayah yang memiliki potensi bencana cukup tinggi dan kompleks. Ini ditambah dengan faktor cuaca ekstrim yang hampir dalam beberapa tahun belakang di wilayah Sumatera Barat, ditambah dengan posisi geografisnya yang mana terletak di jajaran perbukitan dan dikelilingi pegunungan yang masih aktif. Diantara potensi-potensi bencana tersebut antara lain :

1. Ancaman Bencana Alam Erupsi Gunung Api

2. Ancaman Bencana Alam Tanah Longsor
3. Ancaman Bencana Alam Banjir
4. Ancaman Bencana Alam Gempa Bumi
5. Ancaman Bencana Alam Kebakaran
6. Ancaman Bencana Alam Abrasi Pantai
7. Ancaman Bencana Alam Angin Kencang (Badai/ Puting Beliung/Hujan Badai), dan
8. Ancaman Bencana akibat kelalaian manusia.

Kesiapan Sumatera Barat dalam menghadapi berbagai ancaman tersebut telah diupayakan berbagai hal, dari pembentukan Badan Penanggulangan Bencana yang berada di 19 Kabupaten/ Kota, pembentukan Komunitas Siaga Bencana di tiap Kabupaten/ Kota hingga mengadakan sosialisasi dan edukasi bagi masyarakat dan siswa sekolah, serta pengadaan peralatan hingga pemantauan cuaca dan kegunaan dari sumber-sumber terpercaya yang melalui mekanisme yang di selenggarakan oleh instansi-instansi teknis seperti Badan Meteorologi dan Geofisika (BMKG), Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) serta Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional (LAPAN) termasuk sumber-sumber resmi internasional melalui jaringan internet. Sementara itu koordinasi dan jaringan informasi kebencanaan se-Sumatera Barat dilakukan secara intensif dengan Pemda Kabupaten/Kota dalam hal ini BPBD Kabupaten/Kota.

Penyusunan database kebencanaan BPBD Provinsi Sumatera Barat dilakukan dengan pencatatan laporan kejadian bencana di Kabupaten/Kota, baik yang diterima melalui jaringan komunikasi radio dan media komunikasi lainnya yang kemudian terkonfirmasi dengan laporan resmi dari BPBD Kabupaten/Kota ditambah dengan rekapitulasi data per-periode waktu dari BPBD Kabupaten/Kota.

Rekaman kejadian bencana yang tercatat dalam database di PUSDALOPS PB dianalisa dengan metode perhitungan sederhana dimana kejadian yang sama pada tanggal yang sama dihitung 1 kali kejadian bencana. Kelengkapan data terperinci baik wilayah administrasi hingga dampak dan kerugian yang kemudian diakumulasi untuk satu peristiwa bencana yang dimaksud. Selain perhitungan tahunan dimana penjumlahan kejadian bencana dan dampaknya juga dilakukan pemilahan kejadian bencana berdasarkan bulan atau per periode waktu tertentu untuk melihat kecenderungan kejadian bencana pada waktu-waktu tertentu dan kaitannya dengan cuaca dan musim.

Analisa lebih lanjut terhadap database ini dapat digunakan untuk mengetahui kawasan-kawasan yang rawan terhadap jenis-jenis bencana tertentu sehingga dapat dijadikan sebagai dasar penyusunan kebijakan penanggulangan bencana baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

1.1 Gambaran Umum

Berdasarkan rekapitulasi data tahun 2019 yang sudah terhimpun didapatkan bahwa peristiwa bencana di wilayah Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2019 telah terjadi 1106 kejadian bencana dengan total kerugian tercatat Rp. **166.280.356.155.67,-** (Tabel 2.).

Untuk persentase kejadian bencana terbanyak terdapat di kabupaten Padang Pariaman sebanyak 54 kejadian.

Tabel 2. Jumlah kejadian Bencana kabupaten/kota di wilayah Provinsi Sumatera Barat dan total taksiran kerugian tercatat selama Tahun 2019.

No	Kabupaten/Kota	Jumlah	%	Taksiran Kerugian
1	Kabupaten Agam	23	3.07	3.558.500.000
2	Kabupaten Dharmasraya	97	12.93	2.000.000.000
3	Kabupaten Kepulauan Mentawai	12	1.60	-
4	Kabupaten Lima Puluh Kota	62	8.27	52.499.300.000
5	Kabupaten Padang Pariaman	143	19.07	8.579.266.666.67
6	Kabupaten Pasaman	2	0.27	-
7	Kabupaten Pasaman Barat	6	0.80	1.020.000.000
8	Kabupaten Pesisir Selatan	39	5.20	250.000.000
9	Kabupaten Sijunjung	42	5.60	303.5000.000
10	Kabupaten Solok	57	7.60	166.700.000
11	Kabupaten Solok Selatan	39	5.20	97.545.589.489
12	Kabupaten Tanah Datar	54	7.20	20.000.000
13	Kota Bukittinggi	41	5.47	100.000.000
14	Kota Padang	7	0.93	40.000.000
15	Kota Payakumbuh	5	0.67	0
16	Kota Pariaman	1	0.13	15.000.000
17	Kota Padang Panjang	60	8.00	69.000.000
18	Kota Solok	27	3.60	1.000.000
19	Kota Sawahlunto	33	4.40	112.500.000
	Total	750	100,00%	166.280.356.155.67

Jumlah kejadian bencana di seluruh kabupaten/kota dilingkungan Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2019 didominasi oleh peristiwa Pohon Tumbang 293 kejadian (39.06%), diikuti oleh Banjir 155 kejadian (20.67%) dan bencana Longsor 94 kejadian (12.53%) (lihat Tabel 3.)

Tabel 3. Tabel Jumlah Kejadian Perjenis Bencana tercatat selama Tahun 2019.

Jenis Bencana/Kejadian	Jumlah	Persentase
Abrasi Pantai	4	0.53
Angin Badai	2	0.23
Banjir	155	20.67
Banjir Bandang	13	1.73
Gempa Bumi	12	1.60
Hanyut Tenggelam	3	0.40
Longsor	94	12.53
Orang Hilang	3	0.40
Jembatan Rusak	10	1.33
Puting Beliung	36	4.80
Luapan Air	5	0.67
Kabut Asap	6	0.80
Pergerakan Tanah	2	0.23
Pohon Tumbang	293	39.06
Kekeringan	13	1.73
Total	750	100,00%

4. Antisipasi Daerah dalam Menghadapi Kemungkinan Bencana

Pembentukan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Sumatera Barat merupakan bagian dari pelaksanaan amanat UU No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 5 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Dalam pelaksanaannya mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana dan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No. 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dimana dinyatakan bahwa dalam melaksanakan tugasnya Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah wajib membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS PB), termasuk Satgas Reaksi Cepat (meliputi kaji cepat dan penyelamatan/ pertolongan) dan satuan tugas lainnya sesuai dengan kebutuhan

daerah.

Pelaksanaan tugas PUSDALOPS PB mengacu kepada Peraturan Kepala BNPB no. 15 Tahun 2008 dengan tugas pokok membantu Kepala BPBD dalam menyelenggarakan komunikasi, koordinasi, komando, kendali secara efektif & efisien melalui pengumpulan – pengolahan/analisis - verifikasi - pendistribusian data/ informasi secara cepat-tepat-akurat dalam pelaksanaan operasi Penanggulangan Bencana pada pra bencana, saat bencana hingga pasca bencana. Oleh karena itu untuk pemenuhan tugas pokok PUSDALOPS PB menjalankan fungsi-fungsi sebagai berikut:

- Pemantauan dan deteksi dini terhadap semua gejala , ancaman dan kejadian bencana di wilayah Provinsi selama 24 jam/hari-7 hari/minggu secara terus-menerus membuat membuat catatan & laporan harian.
- Pengumpulan, pengolahan, verifikasi dan penyajian data/informasi serta pendistribusian data perkembangan mutakhir situasi ancaman dan kejadian bencana sebagai bahan pertimbangan guna menentukan pengambilan keputusan dan kebijakan lebih lanjut dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
- Menyampaikan secara luas (diseminasi) informasi kebencanaan dan Peringatan Dini Bencana atas otorisasi Pejabat Berwenang kepada instansi/dinas terkait, stakeholder dan masyarakat daerah terancam bencana melalui semua sarana media informasi dan komunikasi.
- Penyelenggaraan dukungan koordinasi dan komando antar instansi/lembaga yang terkait dalam pelaksanaan Penanggulangan Bencana pada pra bencana, saat bencana, tanggap darurat dan pasca bencana.
- Penyelenggaraan sistem komunikasi data/informasi guna mendukung operasi Penanggulangan Bencana
- Pada status keadaan darurat bencana ditetapkan, PUSDALOPS PB ditingkatkan fungsinya menjadi Posko Tanggap Darurat Bencana dibawah kendali operasi Bidang Penanganan Darurat/Bidang Kedaruratan sebagai sarana pendukung Komando Tanggap Darurat.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya PUSDALOPS PB didukung dengan fasilitas-fasilitas sebagai berikut (gambar 1 – 4):

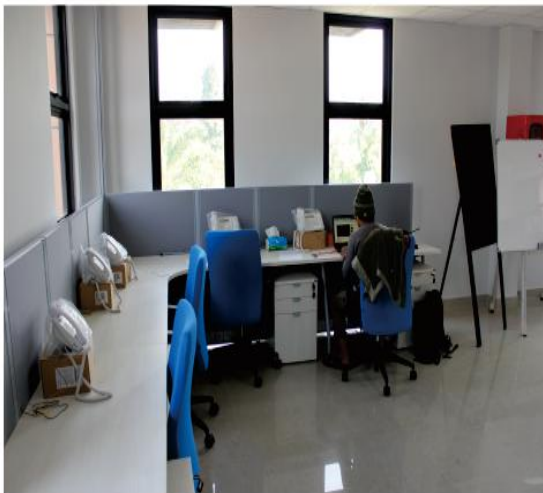
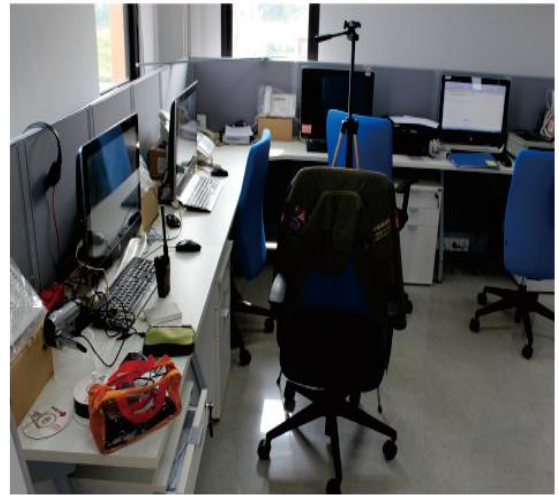
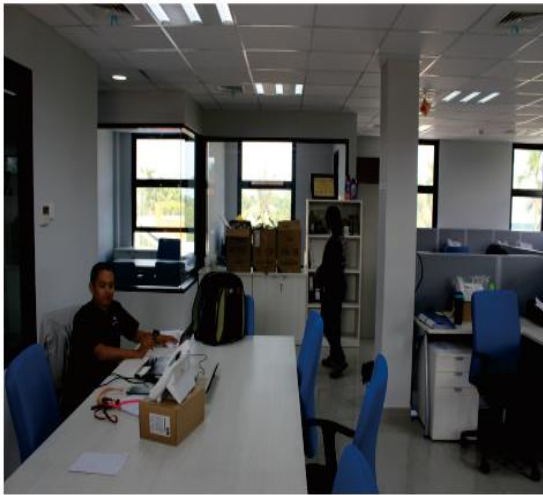
1. Peralatan Komunikasi

- a. Radio Komunikasi HF dan VHF untuk komunikasi nasional dan lokal dalam lingkup Provinsi Sumatera Barat.
- b. Telepon dan Fax

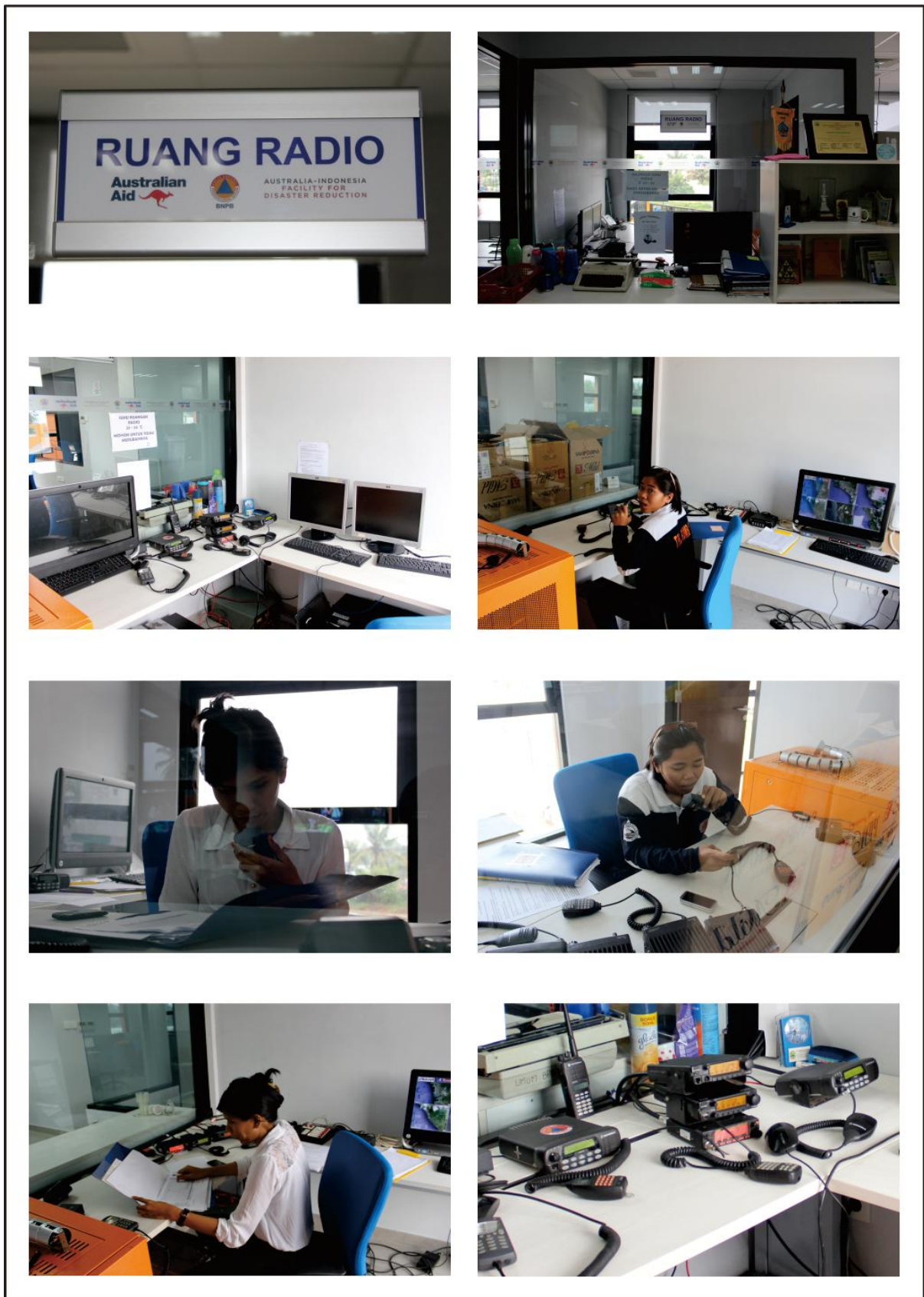
2. Peralatan IT dan jaringan internet
3. Ruang Krisis dan ruang rutin
4. Ruang pertemuan
5. Ruang pimpinan dan manejer
6. Ruang inap dilengkapi kamar mandi dan dapur



Gambar 1. Lokasi Pusdalops PB BPBD Prov. Sumatera Barat di Gedung UPT BNPB, Kompleks Balai Latihan Penyuluh Pertanian, Bandar Buat, Padang



Gambar 2. Ruang krisis dan ruang rutin Pusdalops PB



Gambar 3. Ruang komunikasi Pusdalops PB



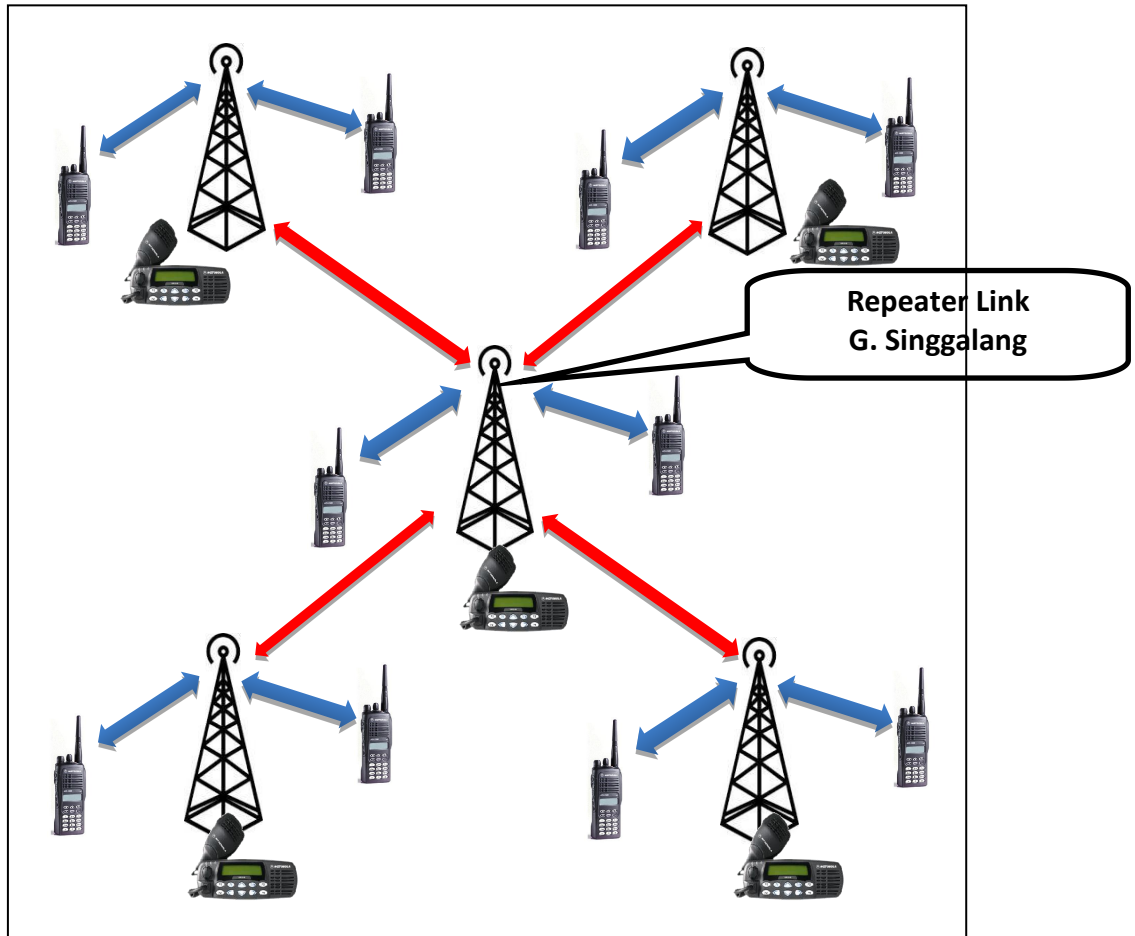
Gambar 4. Ruang inap operator dengan fasilitas kamar mandi dan dapur.

a. Komunikasi Radio Kebencanaan antar wilayah se- Provinsi Sumatera Barat

Dalam rangka memperkuat komunikasi radio kebencanaan antar kabupaten/kota di seluruh Wilayah Provinsi Sumatera Barat, Pemerintah Provinsi melalui BPBD Provinsi Sumatera Barat membangun jaringan komunikasi radio dengan menempatkan *repeater* (pancar ulang frekwensi) di beberapa titik, meliputi :

1. Bukit Gado-gado Gunung Padang, Kota Padang
2. Bukit Biawak, Kab. Pesisir Selatan
3. Komplek Pos Pekonina Kab Solok Selatan
4. Puncak Gunung Singgalang

Untuk memperluas jangkauan komunikasi radio dan menjangkau seluruh wilayah Provinsi Sumatera Barat *repeater* yang ditempatkan di puncak Gunung Singgalang difungsikan sebagai *repeater link*. Konsep pancar ulang tersebut dapat dilihat pada skema gambar 5.



Gambar 5. Skema jaringan komunikasi radio dengan menggunakan *repeater* dan *repeater link*.



Gambar 6. Persiapan Pendakian G. Singgalang untuk pemasangan repeater.



Gambar 7. Repeater Gunung Singgalang sebagai sentral link



Gambar 8. Repeater Bukit Gado Gado



Gambar 9. Repeater Bukit Biawak, Pesisir Selatan

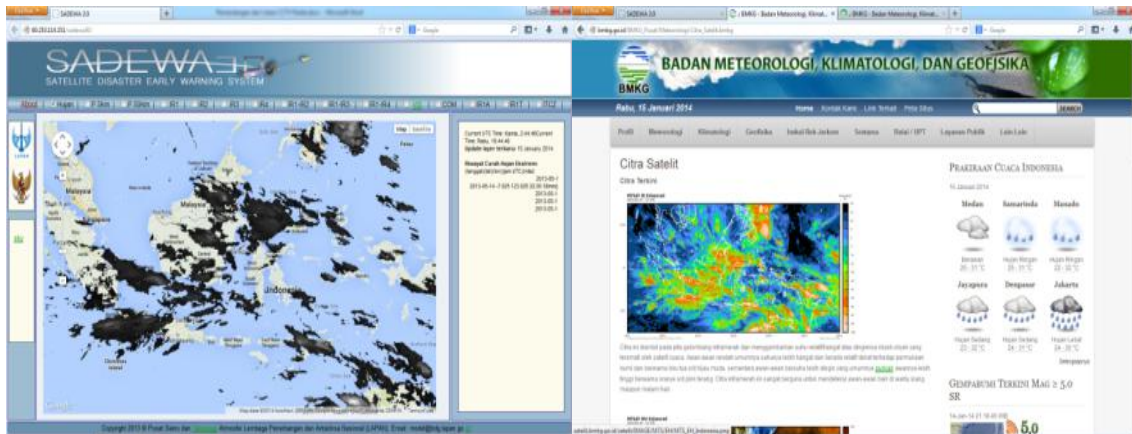


Gambar 10. Repeater Pekonina, Solok Selatan

4.2. Pemantauan Cuaca dan Potensi Banjir

4.2.1. Pemantauan Cuaca pada jaringan Satelit LAPAN dan BMKG

Pemantauan cuaca dilakukan melalui pengamatan visual dan dari jaringan internet terutama citra satelit terkini yang ditayangkan dari website SADEWA (Satellite Early Warning System) LAPAN dan BMKG. Kondisi cuaca yang diperoleh kemudian diseberluaskan melalui jaringan Radio Komunikasi, Komunitas Blackberry Messenger dan Whatsupp, Facebook dan Blogspot.



Gambar 11. Pemantauan cuaca dari website LAPAN dan BMKG.

4.2.2. Pemasangan CCTV Batang Kuranji



Gambar 12. Pemandangan keLokasi CCTV pengamatan air Batang Kuranji, Kompleks Perguruan Adzkia, Kelurahan Kalumbuk, Kecamatan Kuranji, Padang, koordinat. 00° 55,257' LS dan 100° 23.623' BT.

Kamera yang dipasang dilokasi bertipe *Network (IP) Camera*, Panasonic BB-HCM581CE, 42x Zoom (21x Optical & 2x Digital). Kamera menghadap ke Selatan dan dapat dikendalikan atau diputar 360° dari PUSDALOPS PB BPBD Sumatera Barat. CCTV ini bermanfaat untuk pengamatan dan interpretasi dampak terkini dari perubahan cuaca di daerah hulu Batang Kuranji.

4.3. Pemantauan Gempa dan Kesiapsiagaan Tsunami

4.3.1. Penerima informasi gempa dari jaringan Server BMKG dan INATWES



Gambar 13. Foto Ruang Server WRS BMKG untuk informasi Gempabumi dan Peringatan Dini Tsunami

4.3.2. Pemantauan aktifitas seismik

Pemantauan aktifitas Seismik (kegempaan) di sekitar wilayah Sumatera Barat selain dengan mengaktifkan server BMKG juga dilakukan dengan dengan mengaktifkan Intensitimeter dan pemantauan aktifitas seismik pada stasiun-stasiun seismik online terdekat dengan wilayah Sumatera Barat.



Gambar 14. (a) Seismogram dengan Intensiti meter (b) pemantauan aktifitas seismik pada stasiun-stasiun online

4.3.3. Pengaktifan CCTV Pantai



Gambar 15. Pemandangan dari Lokasi CCTV Pantai, lantai 6 Hotel Pangeran Beach, Padang (koordinat posisi 00° 55,434' LS dan 100° 21,003' BT), Jalan Ir H Juanda 79, Padang Utara, Padang.

Kamera yang dipasang dilokasi bertipe *Network (IP) Camera*, Panasonic BB-HCM581ICE, 42x Zoom (21x optical & 2x digital). Pemasangan CCTV ini adalah untuk pengamatan perubahan muka air laut dan kondisi cuaca kawasan pantai secara *real time* dan berkelanjutan dalam rangka siaga tsunami dan cuaca ekstrem. Kamera CCTV menghadap ke Barat dan dapat dikendalikan atau diputar 360° dari PUSDALOPS PB BPBD Sumatera Barat.

4.3.4. Pengaktifan Sirine kontrol West Sumatera-TEWS yang siaga 24 Jam.



Gambar 16. Foto Sistem Pemberitahuan Gempa berpotensi Tsunami, dilengkapi dengan Sirine peringatan berjenjang dan Suara

4.2.1. Aktivasi Sirine INA TEWS (Indonesia Tsunami Early Warning System) BMKG, Informasi Gempa dan Peringatan Dini Cuaca

Dengan telah diserahkannya eksekusi sirine INA TEWS-BMKG ke PUSDALOPS PB BPBD Provinsi Sumatera Barat maka eksekusi peringatan dini gempabumi dan tsunami menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat melalui Operasional PUSDALOPS PB, dan terhitung mulai tanggal 26 Desember 2014 dan setiap tanggal 26 di bulan-bulan berikutnya dilakukan uji coba sirine INA TEWS melalui pusat control yang ditempatkan di PUSDALOPS PB.



Gambar 17. Sosialisasi sekaligus pelatihan dan rapat penyerahan aktivasi sirine INA TEWS kepada PEMDA (BPBD Prov. Sumatera Barat) bersama BMKG Padang Panjang.



Gambar 18. Latihan aktivasi sirine INA TEWS di ruangan server PUSDALOPS PB , bersama BMKG

Jaringan INA TEWS-BMKG yang terpasang di beberapa kabupaten/kota (Kab. Agam, Kab. Pesisir Selatan, Kab. Padang Pariaman, Kota Padang, dan Kota Pariaman, Kecamatan Sikakap, Kecamatan Sipora, Kecamatan Siberut Utara dan Kecamatan Siberut Selatan Kab. Mentawai) di Provinsi Sumatera Barat juga dilengkapi dengan Warning Receiver System (WRS)/Digital Video Broadcasting (DVB) sebagai media pengiriman informasi singkat gempa bumi dan tsunami yang juga telah diintegrasikan dengan Peringatan Dini Cuaca Ekstrem yang di-relay BMKG Padang Panjang. Informasi Peringatan Dini ini rencananya juga akan memasukkan beberapa pihak dari BPBD Kabupaten/Kota yang belum memiliki WRS/DVB BMKG (seperti Kab. Pasaman Barat, Kab. Pasaman, Kab. Lima Puluh Kota, Kab. Tanah Datar, Kab. Sijunjung, Kab. Solok Selatan, Kab. Dharmasraya, Kab. Solok, Kota Solok, Kota Sawahlunto).

4.4 . Pemantauan Aktifitas Gunung Marapi secara visual dan *real time*, CCTV



Gambar 19. Kamera CCTV Pemantauan Gunung Marapi, Jorong Cangkiang, Nagari BatuTaba, Kec. Empat Angkat Candung, di rumah masyarakat atas nama Indarmawan, koordinat Lokasi 0,314275 LS dan 100,4184.

Kamera yang dipasang dilokasi bertipe *Network* (IP) *Camera*, Panasonic BB-HCM581CE, 42x Zoom (21x Optical & 2x Digital) kamera menghadap ke Tenggara. Koneksi kamera menggunakan akses internet Speedy. Dapat diakses secara online pada <http://marapi-seipuar.dynalias.com:60005>.

5. Potensi Bencana yang diperkirakan terjadi

5.1. Gunung Api

Daerah Sumatera Barat memiliki beberapa gunungapi aktif, yaitu **G. Marapi**, **G. Talang**, **G. Tandikek** dan **G. Kerinci**. Secara fisiografis, seluruh gunungapi aktif tersebut berada di zona bukit barisan dan berasosiasi atau berhubungan erat dengan patahan besar Sumatera atau sesar Semangko.

Bahaya gunung api umumnya meliputi:

1. Bahaya Primer

Bahaya primer gunungapi meliputi ancaman-ancaman yang langsung diakibatkan oleh peristiwa letusan gunungapi, yaitu:

- Awan panas atau *pyroclastic flow*, merupakan aliran material panas yang terjadi akibat guguran atau longsoran material panas di puncak gunungapi.

- Guguran/aliran lava pijar.
- Jatuhan material letusan (debu, pasir hingga kerikil dan batu termasuk lava/batu pijar).

2. Bahaya sekunder, yaitu banjir bandang lahar.

Bahaya sekunder umumnya terjadi setelah adanya letusan gunung api dan tumpukan material baru yang tidak stabil atau sisi-sisi lereng tidak stabil atau rentan di sekitar lereng hingga puncak gunung api. Tumpukan material tersebut dapat berubah menjadi aliran sedimen atau banjir bandang pada sungai-sungai yang hulunya mengarah ke wilayah di sekitar gunung api.

Berdasarkan standarisasi peta bahaya gunung api di Indonesia, peta kerawanan bencana gunungapi di bedakan menjadi tiga tipe Kawasan Rawan Bencana (KRB), yaitu :

- a. Kawasan Rawan Bencana I : Kawasan berpotensi terhadap aliran lahar hujan dan adanya kawasan pada radius tertentu berpotensi terhadap hujan abu dan kemungkinan dapat terkena lontaran batu pijar
- b. Kawasan Rawan Bencana II : Kawasan berpotensi terlanda awan panas, lava dan lahar hujan, dan adanya kawasan pada radius tertentu berpotensi terlanda hujan abu lebat dan lontaran batu pijar.
- c. Kawasan Rawan Bencana III : Selalu terancam aliran awan panas, lava dan gas beracun, dan adanya kawasan pada radius tertentu selalu terancam lontaran batu pijar dan hujan abu lebat.

Keberadaan kantong - kantong air di wilayah puncak atau lereng gunung api juga dapat menjadi ancaman ketika kantong - kantong air tersebut sudah jenuh dan dinding-dinding penahan sudah tidak dapat lagi menahan beban dan tekanan. Hal ini dapat memicu jebolnya kantong - kantong air tersebut dan menyebabkan banjir bandang di daerah hilir gunung api. Dengan adanya ancaman dari kantong-kantong air ini, maka keberadaannya harus dipetakan dan dimasukkan kedalam peta ancaman gunungapi sebagai salah satu sumber ancaman pada Peta KRB gunung api.

5.2. Kebakaran

Kebakaran hutan menyebabkan kerugian secara ekologis, ekonomis, dan sosial, menyebabkan rusaknya lahan/hutan dan hilangnya vegetasi pada daerah terbakar, menyebabkan gangguan kesehatan dan masalah transportasi. Secara umum kejadian kebakaran hutan dapat terjadi karena pembukaan lahan dengan pembakaran atau karena kemarau. Di darah Sumatera Barat daerah-daerah yang sangat rawan kebakaran hutan adalah daerah Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Dharmasraya, Kota Sawahlunto.

5.3. Bencana Hidro-Metreologi (Gelombang Pasang - Abrasi, Banjir, Longsor Dan Banjir Bandang)

Bencana Hidro-Metreologi biasanya berkaitan dengan musim hujan dan cuaca ekstrim, di daerah Sumatera Barat dan daerah iklim tropis pada umumnya biasanya berlangsung pada bulan-bulan antara September hingga Maret dan puncaknya akan terjadi pada bulan Januari dan Februari.

5.3.1. Gelombang Pasang - Abrasi

Gelombang pasang dan abrasi merupakan dua fenomena yang dapat dijumpai di daerah-daerah pinggir pantai. Gelombang pasang merupakan gelombang air laut yang energy dan ketinggiannya melebihi batas normal menghempas ke daratan. Gelombang pasang erat kaitannya dengan peristiwa iklim dan cuaca serta interaksi gravitasi bumi, matahari dan bulan. Sedangkan abrasi merupakan pengikisan daerah pantai oleh gelombang, ombak atau aliran air, menyebabkan pergeseran garis pantai maju ke daratan. Dalam proses kejadiannya dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan infrastruktur yang berada di sekitar wilayah pantai.

Secara umum, sebanyak tujuh kabupaten dan kota yang berada di daerah pesisir dapat terancam bencana gelombang pasang dan abrasi terutama daerah pantai yang langsung berhadapan dengan laut lepas dan tidak ada pelindung berupa struktur pemecah ombak dan gelombang atau pelindung alami seperti bakau dan terumbu. Fenomena majunya garis pantai ke darat akibat abrasi dapat dijumpai di Kota Padang, dan Tiku, Kabupaten Pasaman.

5.3.2. Longsor

Daerah berpotensi tanah longsor di Provinsi Sumatera Barat umumnya dijumpai di daerah perbukitan barisan atau daerah berbukit dengan kemiringan lereng yang terjal dan umum terjadi pada daerah yang secara geologi tersusun oleh batuan-batuan vulkanik yang bersifat lepas atau yang telah mengalami pelapukan dengan banyak adanya retakan/ rekahan. Kondisi tersebut apabila terletak di atas lapisan yang kedap air (lapisan gelincir) pada saat hujan turun dengan curah hujan yang tinggi dapat dipastikan akan terjadi longsor.

Selain itu, seringkali dijumpai material vulkanik baru menumpang di atas material vulkanik lama yang sudah terlapukkan menjadi lempung atau tanah – sering disebut juga *paleosoil* – yang bersifat lunak, kedap dan licin ketika basah, seperti yang dijumpai di Malalak, Kabupaten Agam. Pada saat curah hujan tinggi, material vulkanik baru tersebut dapat menjadi jenuh dan *paleosoil* yang berada dibawahnya akan menjadi bidang gelincir bagi material di bawahnya dan bencana dapat terjadi jika kemiringan bidang gelincir tersebut mengarah kepada masyarakat dan infrastruktur.

Pemotongan Lereng atau bukit secara tidak benar juga dapat mengakibatkan longsor. Seperti yang terjadi pada 24 Desember 2012 di Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kab.

Solok, pembangunan rumah dengan cara memotong lereng secara vertikal, dan menempatkan bangunan tidak jauh dari lereng yang di potong telah menyebabkan longsor pada saat hujan dan menewaskan 3 orang penghuni rumah.

Dalam upaya mitigasi dan kesiapsiagaan terhadap ancaman longsor, sangat perlu memperhatikan faktor-faktor risiko, perlu pembenahan tataruang dan ijin mendirikan bangunan secara ketat.

5.3.3. Banjir dan Banjir Bandang

Daerah rawan banjir umumnya berada pada dataran banjir atau daerah limpasan di sekitar sungai, semakin luas daerah tangkapan air semakin besar potensi banjirnya. Peristiwa banjir dapat terjadi ketika curah hujan tinggi dan penampang sungai tidak sanggup lagi menampung air hujan, artinya daerah aliran sungai (DAS) tidak dapat menampung volume air, dan air akan meluap ke dataran di daerah limpasannya. Tidak hanya di saat hujan, di suatu daerah, banjir dapat saja terjadi jika DAS di bagian hulu atau pada *catchmentarea*-nya terjadi curah hujan yang tinggi, dan DAS tidak mampu menahan aliran permukaan (*surfac runoff*) karena berkurangnya vegetasi.

Sementara itu banjir bandang merupakan banjir kiriman yang terjadi jika curah hujan yang tinggi disertai longsor-longsor di daerah hulu dan menyumbat alur sungai. Sumbatan-sumbatan tersebut menyimpan potensi energi yang besar yang siap dilepaskan ketika sumbatan-sumbatan tersebut telah jenuh dan tidak lagi mampu menahan beban dirinya sendiri maupun tubuh air di atasnya. Runtuhnya sumbatan-sumbatan tersebut menghasilkan aliran banjir bercampur material longsor dan dengan energi yang besar akan melanda apapun yang dilaluinya.

Untuk wilayah Sumatera Barat, daerah rawan banjir umumnya daerah dataran yang memiliki DAS yang luas atau area tangkapan air yang luas seperti sungai-sungai besar di Kota Padang, Kota Solok, Kab. Pesisir Selatan, Kab. Padang Pariaman, Kab. Sijunjung, Kab. Solok Selatan dan Kab. Pasaman dan umumnya berhulu di daerah Bukit Barisan, sedangkan banjir bandang umumnya adalah daerah aliran sungai yang berhulu di daerah perbukitan di daerah bukit barisan, baik daerah dataran yang berada di pesisir barat (seperti Kab. Padang Pariaman, Kab. Solok Selatan, Kab. Pasaman Barat, Kab. Pesisir Selatan dan Kota Padang) maupun daerah perbukitan di Bukit Barisan (seperti Kab. Solok, Kab. Solok Selatan, Kab. Pasaman Timur, Kab. Sijunjung).

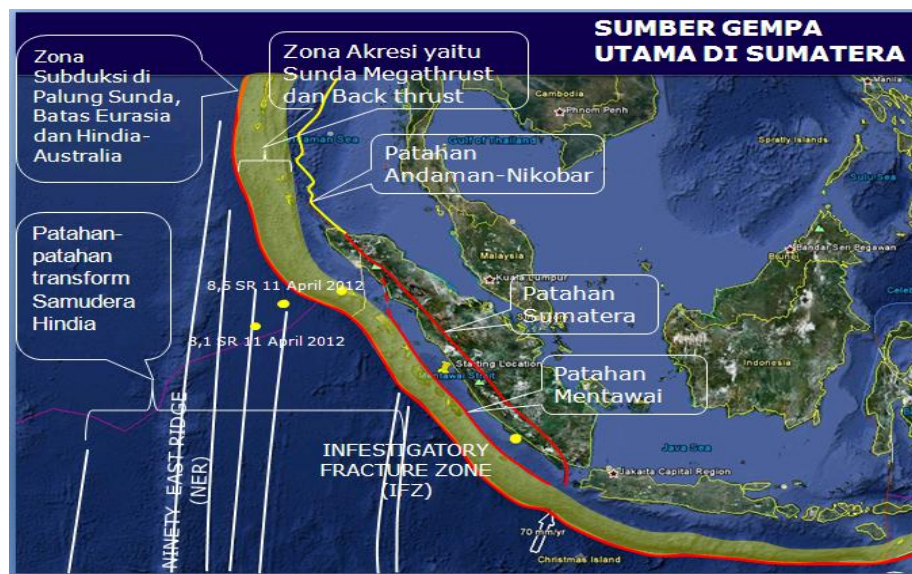
Dalam antisipasi bahaya banjir ini, maka diperlukan inventarisasi sungai-sungai rawan banjir, adanya pemetaan daerah aliran sungai (DAS) sehingga dapat diketahui kapasitas DAS dan hulunya (*catchmentarea*). Inventarisasi sungai-sungai rawan banjir ini dan pemetaan DAS tersebut dapat dilakukan diatas kertas (pemeriksaan peta) maupun survey lapangan sehingga dapat melengkapi peta bahaya banjir. Khusus banjir bandang perlu diwaspadai daerah-daerah berbatuan vulkanik yang tidak terkonsolidasi dan daerah

dengan tingkat pelapukan yang tinggi, dan potensi banjir bandang dapat meningkat pada daerah gundul atau kurang vegetasi.

Dengan kelengkapan data tersebut dapat memudahkan penentuan dan pemilihan kebijakan dalam mitigasi bencana banjir, misalnya perbaikan atau pemulihan DAS dengan pengerukan penampang sungai (normalisasi) atau pemulihan daerah hulu melalui program penghutanan kembali.

5.4. Gempa Bumi

Wilayah Sumatera Barat terletak di bagian Barat pulau Sumatera berhadapan langsung dengan zona subduksi aktif antara Lempeng Tektonik Euro-Asia dengan Lempeng Samudra Hindia-Australia. Gempa-gempa tektonik di lepas pantai Barat pulau Sumatera dan Kepulauan Mentawai sangat erat hubungannya dengan zona subduksi tersebut. Pergerakan Lempeng Euro-Asia ke arah Selatan dan menabrak Lempeng Hindia Australia di sepanjang zona subduksi juga mengakibatkan terbentuknya sesar/patahan besar di Pulau Sumatera (Sesar Sumatera) dan Sesar Mentawai di Cekungan Mentawai, Berhadapan dan menumpang langsung dengan zona subduksi terdapat zona pengangkatan yang disebut dengan Sunda Megathrust.

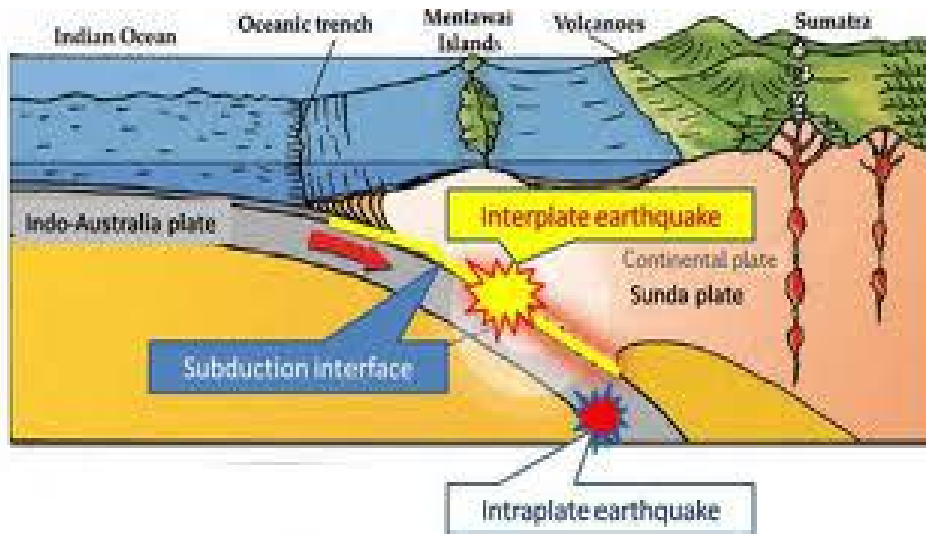


Gambar 20. Sumber-sumber gempa bumi di wilayah Sumatera-Jawa.

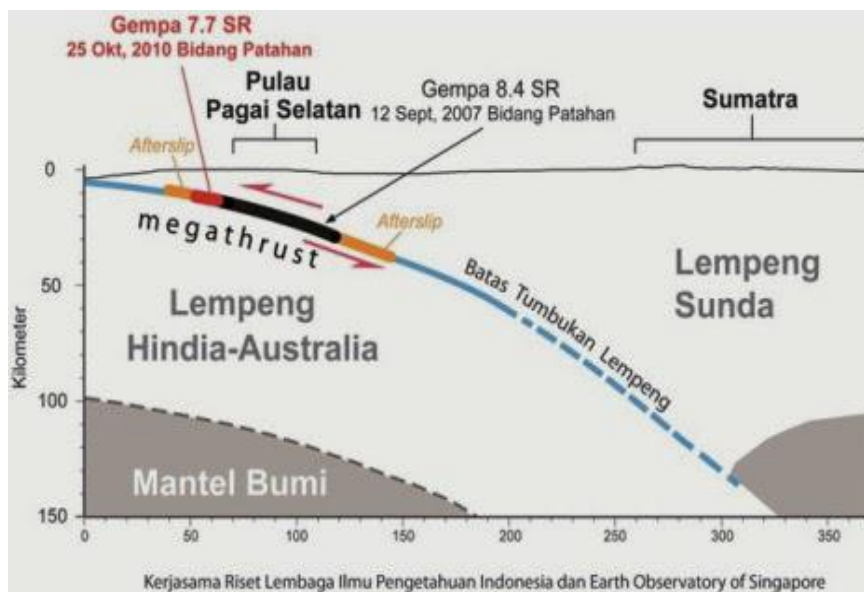
5.4.1. Zona Subduksi

Zona Subduksi Sumatera-Jawa merupakan titik pertemuan Lempeng Samudera Hindia dengan Lempeng Benua Eurasia di sepanjang Palung Sunda di lepas Pantai Barat Pulau Sumatera dan Selatan Pulau Jawa. Kontak antar kedua lempeng tersebut menjadi pusat-pusat gempa aktif mulai dari titik pertemuan di sepanjang Palung Sunda hingga zona kontak di bawah Benua. Pusat-pusat gempa pada zona ini mulai dari titik “nol” batas lempeng di dekat palung hingga kedalaman lebih dari 30 km di bawah kepulauan Mentawai,

30 – 100 km di bawah Selat Mentawai dan >100 km di bawah Pulau Sumatera (Lihat gambar 23).



Gambar 21. Zona gempa pada pertemuan lempeng (*interplate earthquake*)



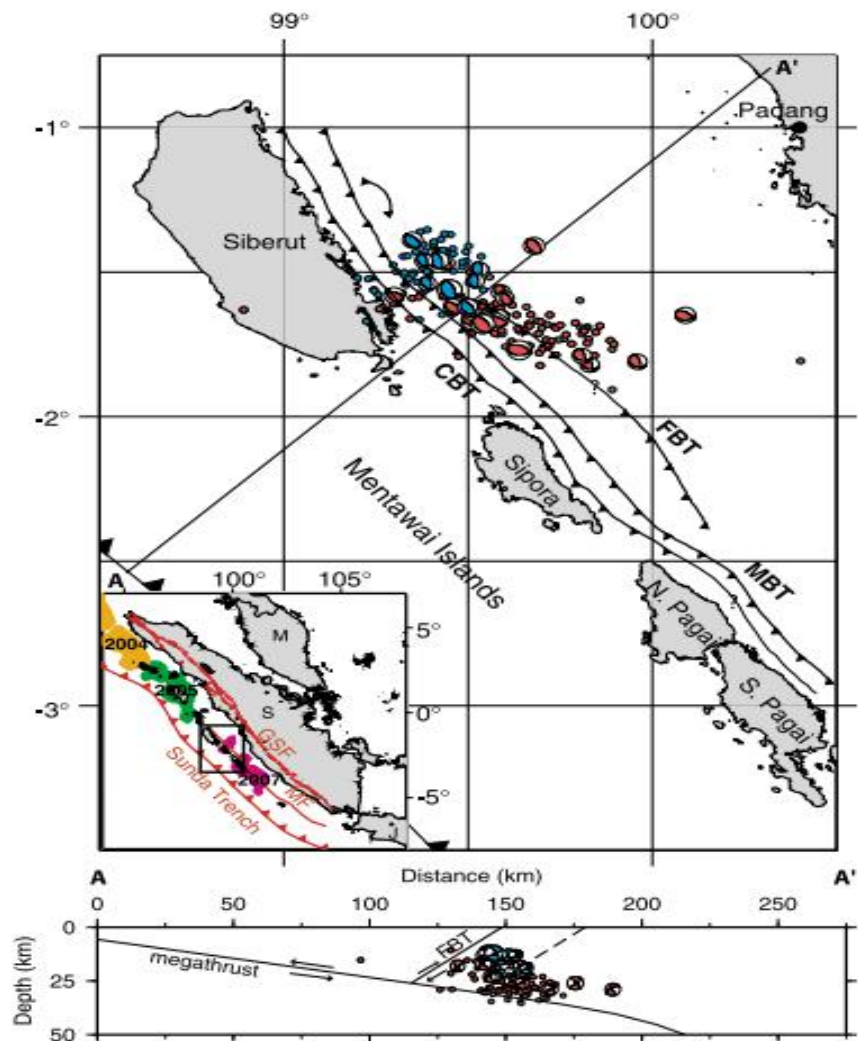
Gambar 22. Kedalaman Subduksi (pada batas Tumbukan lempeng Hindia-Australia dengan Lempeng Sunda/Eurasia)

5.4.2. Sunda Megathrust

Zona megathrust merupakan zona pengangkatan akibat adanya patahan-patahan naik di depan zona subduksi sebagai hasil dari kompresi/tekanan di sepanjang tabrakan lempeng Samudera Hindia-Australia dengan Lempeng benua Eurasia. Patahan-patahan naik tersebut dapat mengangkat daratan dan pulau-pulau karang lebih tinggi ke permukaan. Kegempaan pada zona ini umumnya merupakan gempa-gempa dangkal pada kedalaman kurang dari 50 km dengan karakteristik lambat (gempa lambatslow earthquake) yang umumnya dirasakan berayun.

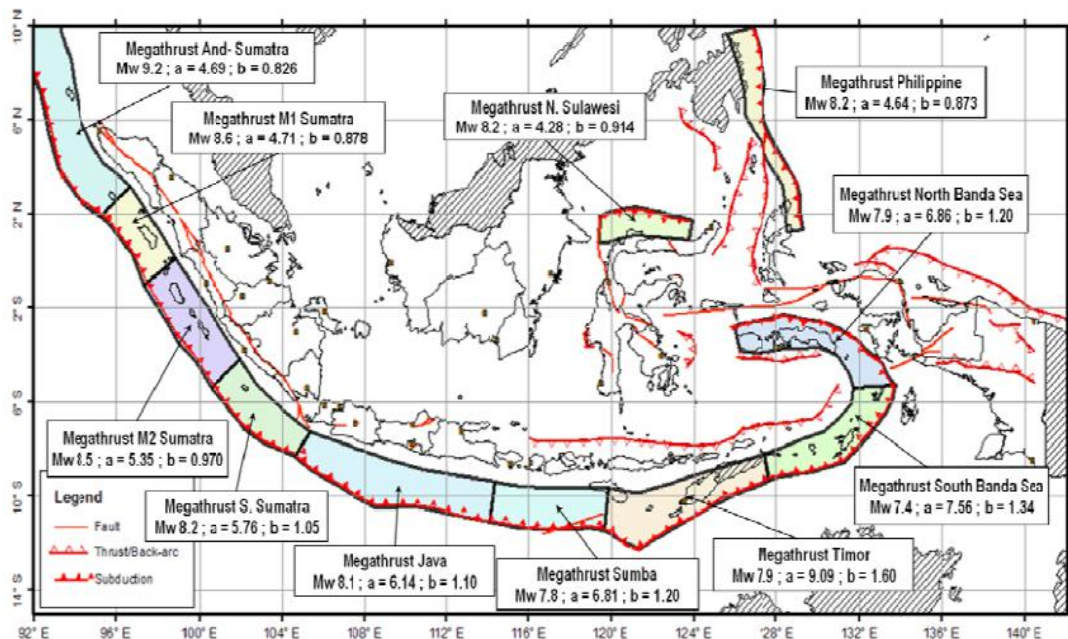
Zona megathrust menurut para ahli selalu berpasangan dengan dengan zona backthrust. Zona ini terdiri dari sesar-sesar anjak (sesar naik) aktif sebagai pelengkap dari megathrust yang secara umum juga mengalami runtuh (rupture) selama terjadinya gempa.

Para ahli membagi zona Megathrust menjadi beberapa segmen berdasarkan rangkaian kegempaan yang terjadi di zona tersebut. Segmen megathrust yang berhadapan langsung dengan wilayah Sumatera Barat adalah Segmen Siberut. Kegempaan pada zona ini akan berdampak langsung pada wilayah Kepulauan Mentawai namun dapat dirasakan di sepanjang Pantai Barat Sumatera.



Gambar 23. Cluster-cluster gempa terkini *Backthrust* Mentawai (gempa-gempa 2009 berwarna biru dan gempa-gempa 2005 berwarna merah). Konfigurasi *backthrust* Mentawai : frontal backthrust(FBT), *mainbackthrust* (MBT), and coastal backthrust (CBT), (S. C. Singh et al., 2010).

Prediksi kegempaan di zona subduksi oleh Tim revisi Peta Gempa Indonesia, 2010, dihitung berdasarkan waktu selang diam atau *seismic gap* segmen-segmen patahan sumber gempa. Berdasarkan perhitungan tersebut diketahui bahwa *Megathrust* Segmen Siberut memiliki potensi gempa dengan magnitudo maksimum $M = 8.5$.



Gambar 24. Model Segmentasi dan parameter sumber gempa zona subduksi (Tim revisi Peta Gempa Indonesia, 2010).

Tabel 5. Data dan Parameter Sumber Gempa di Zona Subduksi (Tim Revisi Peta Gempa Indonesia, 2010)

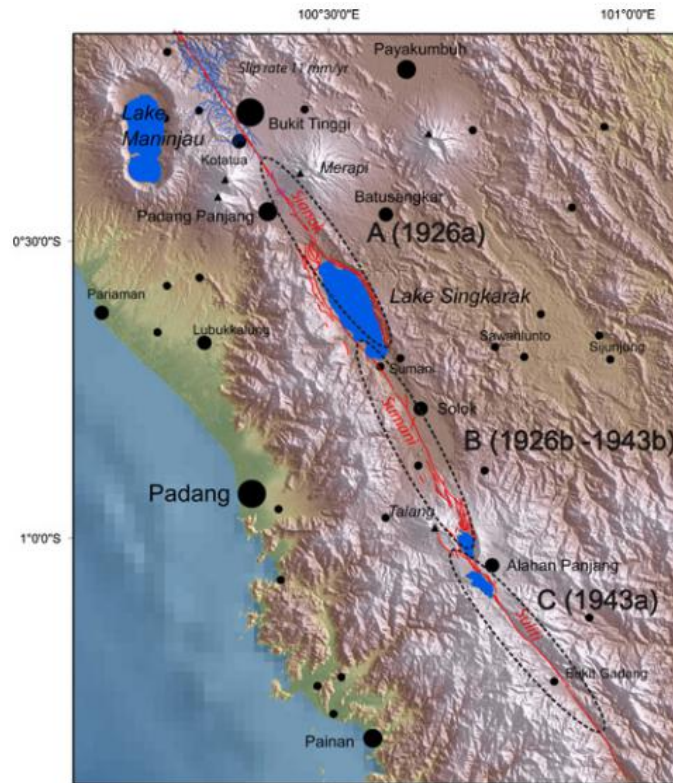
No	Megathrust	$M_{\max} \text{ History}$	$b\text{-val}$	$a\text{-val}$	$M_{\max} \text{ (Desain)}$	
					GR	Char
1	Andaman-Sumatra	9.2 (26-12- 2004)	0.826	4.69	8.0	9.2
2	Nias (Mid-1 Sumatra)	8.7 (28-03-2005)	0.878	4.71	8.7	8.7
3	Siberut (Mid-2 Sumatra)	8.5 (12-09-2007)	0.970	5.35	8.5	8.5
4	Southern Sumatra	7.9 (04-06-2000)	1.050	5.76	8.2	8.2
5	Java	8.1 (27-02-1903)	1.100	6.14	8.1	8.1
6	Sumba	7.8 (11-08-1937)	1.200	6.81	7.8	-
7	Timor	7.9 (20-10-1938)	1.600	9.09	7.9	-
8	North Banda Sea	7.9 (01-03-1948)	1.200	7.26	7.9	-
					7.56	7.0
9	South Banda Sea	7.1 (23-04-1964)	1.340	7.56	7.4	-
					7.56	7.4
10	Northern Sulawesi	7.9 (01-01-1996)	0.914	4.82	8.2	-
11	Philippine	8.2 (14-04-1924)	0.878	4.64	8.2	-

5.4.3. Sistem Patahan Sumatera

Sistem Patahan Sumatera (*Sumatera Fault System, SFS*) atau sering disebut juga Sesar Semangko, dibagi menjadi 12 segmen, dan 5 segmen terdapat di Wilayah Sumatera Barat, yaitu Segmen Siulak ($2.25^{\circ}\text{S} \sim 1.7^{\circ}\text{S}$), Segmen Suliti ($1.75^{\circ}\text{S} \sim 1.0^{\circ}\text{S}$), Segmen Sumani ($1.0^{\circ}\text{S} \sim 0.5^{\circ}\text{S}$), Segmen Sianok ($0.7^{\circ}\text{S} \sim 0.1^{\circ}\text{N}$), Segmen Sumpur ($0.1^{\circ}\text{N} \sim 0.2^{\circ}\text{N}$), sedangkan potensi gempa masing-masing segmen tersebut dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Data dan Parameter sumber gempa pada segmen-segmen Sesar Sumatera (Tim revisi Peta Gempa Indonesia, 2010).

Fault		Slip-Rate		Sense Mechanism	Dip	Top	Bottom	L (km)	M_{\max}
ID	Name	mm/yr	Weight						
1	Aceh	2	1	Strike-slip	90	3	20	230	7.7
2	Seulimeum	2.5	1	Strike-slip	90	3	20	120	7.5
3	Tripa	6	1	Strike-slip	90	3	20	180	7.7
4	Renun	27	1	Strike-slip	90	3	20	220	7.8
5	Toru	24	1	Strike-slip	90	3	20	95	7.4
6	Angkola	19	1	Strike-slip	90	3	20	160	7.6
7	Barumun	4	1	Strike-slip	90	3	20	125	7.5
8	Sumpur	23	1	Strike-slip	90	3	20	35	6.9
9	Sianok	23	1	Strike-slip	90	3	20	90	7.3
10	Sumani	23	1	Strike-slip	90	3	20	60	7.2
11	Suliti	23	1	Strike-slip	90	3	20	95	7.4
12	Siulak	23	1	Strike-slip	90	3	20	70	7.2



Gambar 25. Segmentasi Zona Sesar Sumatera (Natawidjaja et al., 1995). Gempa pada segmen-segmen tersebut dapat memicu peningkatan aktifitas gunungapi di wilayah Sumatera.

5.4.4. Sistem Patahan Mentawai

Sistem Patahan Mentawai (Mentawai Fault System) merupakan zona patahan yang sejajar atau paralel dengan Zona Patahan Sumatera, terbentang dari Barat Laut ke Tenggara di antara Kepulauan Mentawai dan Daratan Sumatera.

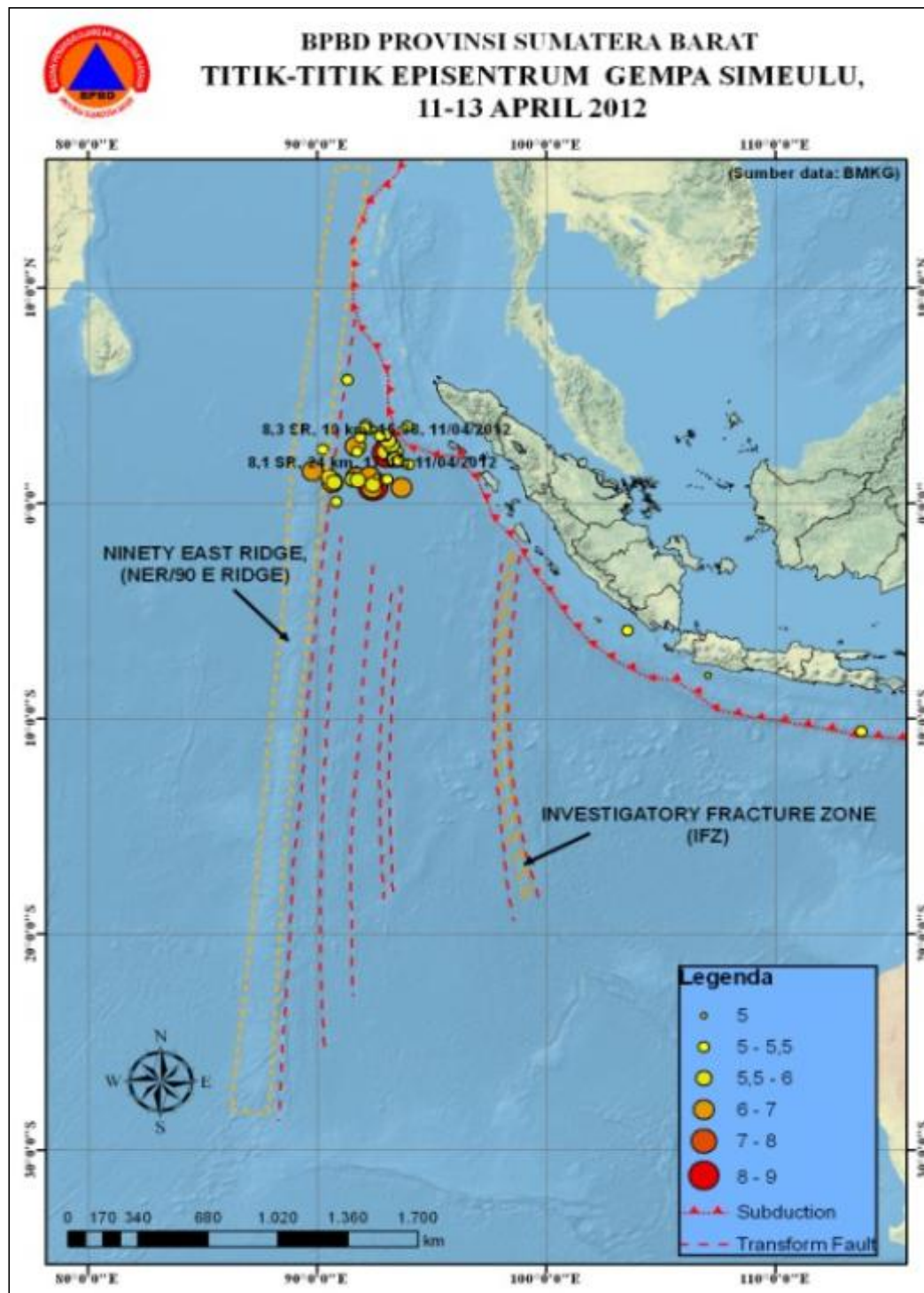
5.4.5. Sistem Patahan Samudra Hindia

Desakan ke arah utara dari pusat pemekaran samudra pada MOR (Mid Oceanic Ridge) di Selatan Samudra Hindia membentuk struktur-struktur sesar mendatar (transform faults) di lempeng samudra. Struktur yang dominan adalah “transform ridges” berupa strike slip fault (geser searah/sepanjang bidang atau jalur sesar) yang berarah NNE (Utara Timur Laut) – SSW (Selatan Barat Daya), yang paling besar adalah **Ninety East Ridge (NER)** di sebelah Barat, memanjang hampir utara selatan, NNE – SSW, dengan ujung berada di bawah kipas Benggal (selatan Bangladesh), sedangkan yang di Timur dinamai **Investigator Fracture Zone (IFZ)** yang berujung di zona subdusi di Barat Daya Pulau Sipora, Kepulauan Mentawai dan menerus ke bawah Pulau Sumatera di bawah Siberut pada kedalaman di bawah 50 km hingga Pasaman pada kedalaman di atas 100 km.

Para ahli sebelumnya berasumsi bahwa zona-zona *transform ridges* tersebut merupakan zona *aseismic* (zona tidak aktif gempa). Namun gempabumi Aceh 11 Januari 2012 yang berkekuatan 7,1 SR, dan sejumlah gempabumi 11 April 2012 yang berkekuatan 8,3 SR dan 8,1 SR, telah mengubah persepsi para ahli bahwa “transform ridge” juga harus diperhitungkan sebagai penghasil gempa yang besar. Hingga saat ini, aktifitas kegempaan di

zona-zona ini masih terpusat pada “transform ridge” disekitar Ninety East Ridge (NER) di Barat Pulau Simeulue, Nanggroe Aceh Darussalam.

Namun demikian sungguhpun memiliki potensi gempa yang besar, namun potensi tsunami akibat gempanya tidaklah lebih besar dibandingkan dengan gempa-gempa yang ditimbulkan oleh subduksi dan “*megathrust*”. Hal inilah yang terjadi pada peristiwa gempa Aceh 11 Januari 2012 dan 11 April 2012, meskipun besar kekuatan gempanya namun kecil kemungkinan tsunaminya. Namun demikian adalah suatu keniscayaan bahwa kita harus selalu meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan terhadap kemungkinan bencana.

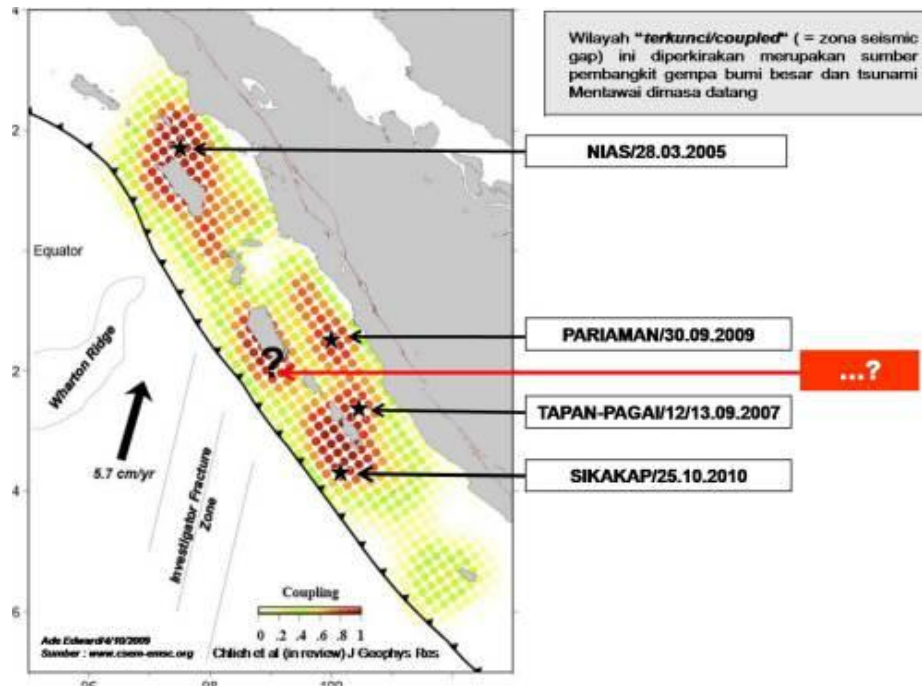


Gambar 26. Aktifitas

kegempaan di sekitar Ninety East Ridge (NER) di Barat Pulau Simeulue, Nanggroe Aceh Darussalam, April 2012.

5.5. Perkiraan Aktifitas Kegempaan dan Ancaman Tsunami

Meskipun para ahli geologi dan kegempaan telah dapat menetapkan zona-zona gempa dan dapat memprediksi potensi kegempaan yang mungkin terjadi, namun belum ada metoda untuk menentukan kepastian kejadian gempa secara akurat. Fakta empiris menyatakan bahwa data kegempaan dan hasil kajian-kajian para peneliti menunjukkan korelasi yang dapat dijadikan acuan dalam kegiatan mitigasi dan kesiapsiagaan.



Gambar 27. Korelasi prediksi wilayah berpotensi gempa bumi besar dengan fakta empiris.

Dimasa yang akan datang, kegempaan di seluruh wilayah Sumatera Barat, jika berkesesuaian dengan hasil kajian para ahli, mungkin saja akan mengakibatkan banyak kerusakan dan kerugian di berbagai sektor. Oleh karena itu karena perlu mempertimbangkan aspek-aspek keamanan dan keselamatan dalam pembangunan, penguatan masyarakat melalui pendidikan dan pemahaman yang benar dan sesuai tentang kegempaan.

Disamping gempa bumi, potensi tsunami di wilayah Sumatera Barat dan sekitarnya patutlah menjadi perhatian dan diwaspadai. Potensi tsunami ini akan berasosiasi dengan gempabumi di sepanjang *Sunda Megathrust*. Berdasarkan perhitungan para ahli, *Megathrust* di *Sub-segment Siberut* masih menyimpan potensi gempa yang besar, sementara itu Zona transform fault di sepanjang *Investigator Fracture Zone* (IFZ) belum menunjukkan aktifitas yang signifikan.

Seperti halnya kegempaan di wilayah Barat dan Utara Simeulue hingga daerah Kepulauan Andaman, secara empiris terdapat korelasi antara kegempaan di sepanjang zona *transform fault* di sekitar *Ninety East Ridge* (NER) dengan kegempaan di zona subduksi dan megathrust di wilayah tersebut, maka perlu diwaspadai bahwa peningkatan aktifitas di sepanjang *Investigatory Fracture Zone* (IFZ) sangat mungkin akan memicu aktifitas kegempaan di *megathrust* Segmen Siberut yang “diam” (gambar 27). Gempa pada segmen ini dapat mengakibatkan kerusakan yang hebat di sekitar Kepulauan Mentawai, namun dapat dirasakan di daratan Sumatera. Perlu juga diwaspadai bahwa aktifitas gempa di zona *megathrust* dapat memicu gelombang tsunami.

Berdasarkan Dokumen Rencana Kontinjensi Menghadapi Bencana Tsunami Provinsi Sumatera Barat 2012, diketahui bahwa dari 19 Kabupaten Kota di seluruh wilayah Provinsi Sumatera Barat terdapat 7 kabupaten/kota, 37 kecamatan, dan 243 kelurahan/nagari/desa yang terancam bahaya tsunami. Dari 7 kabupaten/kota tersebut diperkirakan terdapat 921.349 penduduk atau sebesar 16,40% dari total jumlah penduduk daerah pesisir (7 kabupaten/kota) akan terpapar bencana tsunami (lihat Tabel 7)

Tabel 7. Kabupaten/Kota Terancam Bencana Tsunami

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Terpapar			
		Kecamatan	Kelurahan/ Nagari/Desa	Penduduk (jiwa)	Penduduk (%)
1	Kab. Pesisir Selatan	10	57	245.916	43.26%
2	Kota Padang	8	78	508.804	58.38%
3	Kab. Padang Pariaman	6	9	24.861	5.23%
4	Kota Pariaman	3	51	25.029	27.94%
5	Kab. Agam	1	3	20.644	3.81%
6	Kab. Pasaman Barat	5	12	78.782	17.69%
7	Kab. Mentawai	4	33	17.313	21.02%
Provinsi Sumatera Barat		37	243	921.349	16.40%

Dengan tingginya dampak yang akan diakibatkan oleh bencana tsunami maka secara keseluruhan, dalam upaya pengurangan risiko bencana, perlu dilakukan langkah-langkah mitigasi dan kesiapsiagaan hingga ke level masyarakat, perlu dilakukan upaya peningkatan pemahaman pada masyarakat, pembangunan infrastruktur, sarana sosialisasi dan peringatan dini serta arahan pada masyarakat perlu ditingkatkan.

F. Pengelolaan Kawasan khusus

Pengelolaan kawasan khusus bukan merupakan Tugas Pokok dan Fungsi BPBD Provinsi Sumatera Barat

G. Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum bukan merupakan Tugas Pokok dan Fungsi BPBD Provinsi Sumatera Barat.

I. BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Bidang Urusan Penanggulangan Bencana Tahun Anggaran 2019 dapat terlaksana dengan baik, hal ini dapat dilihat dari pencapaian realisasi keuangan 10 program dan 43 kegiatan yang mencapai 95.69% atau sebesar Rp.24.055.758.403,- dari total alokasi anggaran sebesar Rp. 25.140.0912.587,-, dan realisasi fisik mencapai 100.00%. Sementara itu, tinjauan terhadap dampak dan manfaat, serta kinerja yang diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan sudah terpenuhi, terutama tugas-tugas kebencanaan, baik penanganan bencana gempa bumi, gunung api, banjir, longsor, angin puting beliung dan lain sebagainya.

B. Saran

- 1) Perlu peningkatan koordinasi antara instansi/lembaga penanggulangan bencana baik di tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi maupun Pusat, dengan BNPB, perguruan tinggi, serta lembaga-lembaga donor penanggulangan bencana.
- 2) Pencapaian kinerja dan tertib administrasi keuangan pada BPBD Provinsi Sumatera Barat perlu ditingkatkan sehingga dapat memberikan manfaat bagi peningkatan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Sumatera Barat.
- 3) Data dan informasi yang tersedia hendaknya, dimanfaatkan untuk penyusunan program dan kegiatan, sehingga menjadi dasar perbaikan dalam menetapkan langkah-langkah dan kebijakan.
- 4) Menyediakan tenaga pendamping, tidak hanya fasilitator pelaksana kegiatan tangguh untuk masing-masing lokasi selama 3 tahun, sehingga pemberdayaan masyarakat dapat berkesinambungan.
- 5) Kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan Pengurangan Risiko Bencana melalui dana APBD Provinsi perlu dilaksanakan secara berkelanjutan setiap tahunnya karena anggaran untuk peningkatan kapasitas kelembagaan di BPBD Kabupaten/Kota masih sangat terbatas.
- 6) Kelengkapan sarana dan prasarana Kelompok Siaga Bencana (KSB Nagari/Kelurahan/Desa), Satuan Tugas Penanggulangan Bencana Nagari/Kelurahan/Desa dan Kelompok Sekolah Siaga sangat diperlukan, sehingga kelembagaan pengurangan risiko bencana yang telah ada dapat berfungsi secara optimal.

- 5) Perlunya perencanaan dan persiapan yang baik sebelum memutuskan melaksanakan suatu pengadaan.
- 6) Untuk yang akan datang referensi harus sudah dilengkapi saat merencanakan kegiatan.
- 7) Perlunya peningkatan baik kualitas maupun kuantitas dari sumber daya yang ada.
- 8) Perlunya kejelasan tentang pengurusan sarana dan prasarana yang telah dipasang di daerah (Kabupaten/Kota) sehingga sarana dan prasarana tersebut tetap terjaga.
- 9) Perlunya kerjasama yang baik semua pihak untuk pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Kabupaten/Kota.
- 10) Perlunya dukungan dana untuk pembekalan bagi pegawai BPBD Provinsi dan Kabupaten/Kota serta intansi terkait terutama untuk Pelatihan Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU Pasna), DaLA dan PDNA, karena untuk mempercepat pengusulan dana rehabilitasi dan rekonstruksi ke BNPB perlu adanya perhitungan kerugian dan kerusakan yang merupakan dasar bagi BNPB memberikan bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Padang, Januari 2020

**Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Provinsi Sumatera Barat,**

H.ERMAN RAHMAN,M.Si.

Pembina Utama Muda/NIP. 196310071990081001